

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL  
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA  
DI JAWA TIMUR)



SKRIPSI

oleh:

Nama : Hasna Amalia

No. Mahasiswa : 09312272

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2013

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL  
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA  
DI JAWA TIMUR)



SKRIPSI

oleh:

Nama : Hasna Amalia

No. Mahasiswa : 09312272

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2013

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL  
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA  
DI JAWA TIMUR)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

oleh :

Nama : Hasna Amalia

No. Mahasiswa : 09312272

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2013

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Juni 2013

Penyusun,



PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL  
(STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA  
DI JAWA TIMUR)

Hasil Penelitian

diajukan oleh:

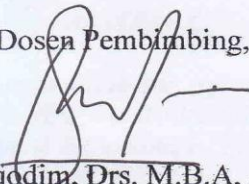
Nama : Hasna Amalia

No.Mahasiswa : 09312272

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20-06-2013

Dosen Pembimbing,



Muqodim, Drs. M.B.A, Ak.

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

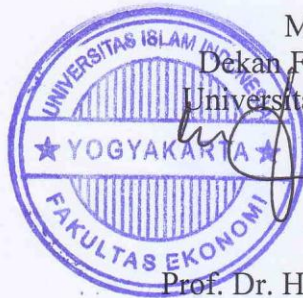
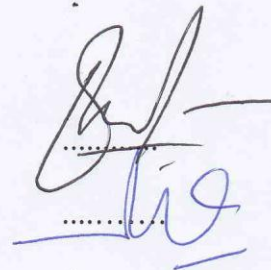
**SKRIPSI BERJUDUL**

Pengaruh Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal  
(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)

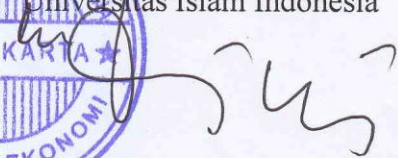
**Disusun Oleh: HASNA AMALIA**  
**Nomor Mahasiswa: 09312272**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 17 Juli 2013

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Muqodim, MBA, Ak  
Penguji : Fitriati Akmila, SE, M.Com



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

  
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

## MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya...”

( Q.S. Al – Baqarah: 286 )

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al Insiroh : 5-8)

“Beramallah kamu untuk duniamu seakan – akan kamu hidup selama – lamanya dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah – olah kamu akan mati esok hari”

( Al – Hadist diriwayatkan Baihaqi )

“Telah tersedia tempat untukmu di barisan pertama. Yakni, dengan syarat engkau selalu menekuni dan lebih menyempurnakan setiap hal yang engkau kerjakan”

((Dr. ‘Aidh al-Qarni)

“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.”

(Thomas A. Edison)

“Hal – hal paling baik dan paling indah di dunia ini tidak bisa dilihat dengan mata, atau disentuh, tetapi dirasakan dengan hati.”

(Helen Keller)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bingkisan kecil ini kupersembahkan untuk:

Bapakku tercinta Kamil Sudirahardjo,

Ibuku tercinta Isminah,

Kakak – kakakku tersayang,

Serta keluarga besar dan sahabat – sahabatku,

Terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Hadri Kusuma,MBA.DBA,Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs, Muqodim., M.B.A., Ak., selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas bimbingan serta kritik dan saran yang Bapak berikan selama proses pembuatan skripsi.
3. Orang tua tercinta Bapak Drs.Kamil Sudirahardjo dan Ibu Isminah yang senantiasa memberikan doa dan segala fasilitas-fasilitas serta dukungan

kepada saya dalam mengerjakan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada orang tua saya.

4. Kakak - kakakku tersayang Lita Dhyesta, Vita Hayu, dan Khuri Imani atas segala dukungan, motivasi, dan doanya.
5. Teman – teman kosku, 121B, Intan, Tari, Anis, Naya, Adel, Nena, Nita, Mbak Citra, Mbak Wening, Mbak Tunjung, Mbak Desvy, Mbak Tika, Mbak Septa, dek Nurul, dan dek Nita. Terimakasih telah menjadi keluarga dan setia dalam pahit manis perjuangan selama ini.
6. Teman – teman OCB, Dina, Eni, Adel, Rizka, Tiara, Fitri, Dita, Cacha, Nita, Liandra, Donny, Ghaniy, Ian, Adit, Ikhsan, Apri, Mbendol, Ari, Fata. Terima kasih atas persahabatannya selama ini.
7. Teman – teman satu bimbinganku Rizka, Tata, Putri, Alvien, dan Nita yang telah banyak membantu. Terimakasih banyak atas bantuan kalian.
8. Teman – teman KKN unit 97, Fifi, Ahya, Septi, Toif, Char, Ridho, dan Mas Satya.

Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan skripsi masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Penulis,

(Hasna Amalia)

## DAFTAR ISI

|                                                            | Hal      |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Halaman Sampul .....                                       | i        |
| Halaman Judul .....                                        | ii       |
| Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....                 | iii      |
| Halaman Pengesahan .....                                   | iv       |
| Motto .....                                                | v        |
| Halaman Persembahan .....                                  | vi       |
| Kata Pengantar .....                                       | vii      |
| Daftar Isi .....                                           | ix       |
| Daftar Tabel .....                                         | xiv      |
| Daftar Gambar .....                                        | xv       |
| Daftar Lampiran .....                                      | xvi      |
| Abstrak .....                                              | xvii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>1</b> |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                          | 1        |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                 | 6        |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                               | 6        |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                              | 7        |
| 1.5. Sistematika Pembahasan .....                          | 7        |
| <b>BAB II KAJIAN TEORETIK.....</b>                         | <b>9</b> |
| 2.1. Landasan Teori .....                                  | 9        |
| 2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ..... | 9        |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.2. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah .....                                      | 11        |
| 2.1.3. Pajak Daerah .....                                                             | 14        |
| 2.1.4. Retribusi Daerah .....                                                         | 16        |
| 2.1.5. Dana Alokasi Umum (DAU) .....                                                  | 17        |
| 2.1.6. Dana Alokasi Khusus (DAK) .....                                                | 19        |
| 2.1.7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) .....                                  | 23        |
| 2.2. Penelitian Terdahulu .....                                                       | 24        |
| 2.3. Hipotesis Penelitian .....                                                       | 26        |
| 2.3.1. Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Modal .....                               | 26        |
| 2.3.2. Hubungan Retribusi Daerah dengan Belanja Modal .....                           | 27        |
| 2.3.3. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan<br>Belanja Modal .....                 | 28        |
| 2.3.4. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan<br>Belanja Modal .....               | 29        |
| 2.3.5. Hubungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)<br>dengan Belanja Modal ..... | 30        |
| 2.4. Kerangka Pemikiran .....                                                         | 31        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                | <b>32</b> |
| 3.1. Objek Penelitian .....                                                           | 32        |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data .....                                                      | 32        |
| 3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....                               | 32        |
| 3.3.1. Belanja Modal .....                                                            | 33        |
| 3.3.2. Pajak Daerah .....                                                             | 33        |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.3. Retribusi Daerah .....                                        | 33 |
| 3.3.4. Dana Alokasi Umum (DAU) .....                                 | 34 |
| 3.3.5. Dana Alokasi Khusus (DAK) .....                               | 34 |
| 3.3.6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) .....                 | 34 |
| 3.4. Metode Analisis Data .....                                      | 34 |
| 3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif .....                           | 34 |
| 3.4.2. Uji Asumsi Klasik .....                                       | 35 |
| 3.4.2.1. Uji Normalitas .....                                        | 35 |
| 3.4.2.2. Uji Multikolinieritas .....                                 | 35 |
| 3.4.2.3. Uji Autokorelasi .....                                      | 36 |
| 3.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas .....                               | 37 |
| 3.4.3. Metode Regresi Linear Berganda .....                          | 38 |
| 3.5. Pengujian Hipotesis .....                                       | 39 |
| 3.5.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) ..... | 40 |
| 3.5.2. Koefisien Determinasi $R^2$ .....                             | 40 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....                                 | 41 |
| 4.1. Deskripsi Data Penelitian .....                                 | 41 |
| 4.1.1. Pajak Daerah .....                                            | 42 |
| 4.1.2. Retribusi Daerah .....                                        | 43 |
| 4.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU) .....                                 | 44 |
| 4.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) .....                               | 45 |
| 4.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) .....                 | 45 |
| 4.1.6. Belanja Modal .....                                           | 46 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 4.2. Statistik Deskriptif .....                               | 47 |
| 4.3. Uji Asumsi Klasik .....                                  | 53 |
| 4.3.1. Uji Normalitas .....                                   | 53 |
| 4.3.2. Uji Multikolinieritas .....                            | 54 |
| 4.3.3. Uji Autokorelasi .....                                 | 55 |
| 4.3.4. Uji Heteroskedastisitas .....                          | 56 |
| 4.4. Analisis Regresi Linier Berganda .....                   | 57 |
| 4.5. Pengujian Hipotesis .....                                | 59 |
| 4.5.1. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) .....                 | 60 |
| 4.5.1.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja               |    |
| Modal .....                                                   | 60 |
| 4.5.1.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap                   |    |
| Belanja Modal .....                                           | 60 |
| 4.5.1.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)                     |    |
| terhadap Belanja Modal .....                                  | 61 |
| 4.5.1.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)                   |    |
| terhadap Belanja Modal .....                                  | 61 |
| 4.5.1.5. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran             |    |
| (SiLPA) terhadap Belanja Modal .....                          | 62 |
| 4.6. Hasil Koefisien Determinasi $R^2$ .....                  | 63 |
| 4.7. Pembahasan Hasil Penelitian .....                        | 64 |
| 4.7.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal .....     | 64 |
| 4.7.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal ..... | 64 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 4.7.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap        |    |
| Belanja Modal .....                                     | 65 |
| 4.7.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap      |    |
| Belanja Modal.....                                      | 66 |
| 4.7.5. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) |    |
| terhadap Belanja Modal .....                            | 67 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....                        | 69 |
| 5.1. Kesimpulan .....                                   | 69 |
| 5.2. Keterbatasan Penelitian .....                      | 70 |
| 5.3. Saran .....                                        | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                    | 72 |
| LAMPIRAN .....                                          | 75 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                    | Hal |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD .....         | 10  |
| Tabel 4.1. Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur .....     | 43  |
| Tabel 4.2. Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ..... | 44  |
| Tabel 4.3. DAU Kabupaten dan Kota di Jawa Timur .....              | 44  |
| Tabel 4.4. DAK Kabupaten dan Kota di Jawa Timur .....              | 45  |
| Tabel 4.5. SiLPA Kabupaten dan Kota di Jawa Timur .....            | 46  |
| Tabel 4.6. Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Jawa Timur .....    | 47  |
| Tabel 4.7. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Independen .....    | 48  |
| Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinieritas .....                       | 55  |
| Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi .....                            | 56  |
| Tabel 4.10. Hasil Estimasi Regresi .....                           | 58  |
| Tabel 4.11. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....                    | 62  |
| Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi .....          | 63  |

## DAFTAR GAMBAR

Hal

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal ..... | 31 |
| Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas .....                                                                                                                                                               | 54 |
| Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....                                                                                                                                                      | 57 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                           | Hal |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Data Variabel Independen dan Dependen .....    | 75  |
| Lampiran 2 Statistika Deskriptif .....                    | 80  |
| Lampiran 3 Hasil Analisis Regresi dan Asumsi Klasik ..... | 81  |
| Lampiran 4 Tabel Durbin-Watson .....                      | 84  |

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Variabel independen adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, SiLPA dan variabel dependennya adalah Belanja Modal.*

*Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pusat. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan software SPSS 16 untuk mengolah data yang ada.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.*

**Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Modal**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik pemerintah daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode atau tahun tertentu (Mardiasmo, 2002). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004).

Peningkatan pelayanan di berbagai sektor sangat diharapkan, terutama di sektor publik. Dengan adanya peningkatan pelayanan kepada publik di suatu daerah, dapat berakibat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah (Kawedar dkk, 2008). Dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan akan membentuk struktur PAD yang kuat di masing-masing daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (UU 28/2009).

Potensi keuangan tiap daerah yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransferkan dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU 33/2004). Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal karena

DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat, untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan (Abdullah, 2013). Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 mengatakan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur.

Darwanto dan Yustikasari (2007) dalam penelitiannya melakukan uji pengaruh 3 variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap belanja modal menggunakan data APBD kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2004-2005. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, hasil penelitian secara parsial menunjukkan PAD dan DAU secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian Sumarmi (2009) menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi belanja modal dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dalam penelitiannya, Sumarmi meneliti APBD kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2002-2007. Pengujian secara simultan menunjukkan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pengujian secara parsial, PAD dan DAK berpengaruh

positif signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarmi (2009). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek dan data penelitian karena objek yang digunakan pada penelitian ini adalah APBD Kab./Kota di Jawa Timur dan periode yang digunakan adalah tahun 2007-2011. Jawa Timur dipilih penulis sebagai objek penelitian karena Jawa Timur merupakan provinsi dengan kegiatan ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, jumlah penduduk terbesar, sebagai provinsi dengan jumlah kab./kota terbanyak, infrastruktur di Jawa Timur cukup tersedia (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2011). Pendapatan asli daerah dirinci menjadi pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (UU 28/2009). Selain itu, penambahan variabel independen dalam penelitian ini yaitu SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
- b. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
- c. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?
- d. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?
- e. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal
- b. Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal
- c. Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal
- d. Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal

- e. Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan tentang teori maupun praktik-praktik akuntansi pada Pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pendidikan Akuntansi

Dapat menambah topik kepustakaan, khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik/Akuntansi Pemerintahan.

#### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

## BAB II : KAJIAN TEORETIK

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III akan membahas mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

## BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memperlihatkan deskripsi statistik objek penelitian, hasil analisis (uji asumsi klasik analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis, dan hasil koefisien determinasi  $R^2$ ), dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber – sumber kekayaan daerah. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Struktur APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri No.13 tahun 2006 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun KUA dan PPAS untuk selanjutnya diserahkan kepada DPRD. Setelah PPAS telah disetujui DPRD, maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

Tabel 2.1.

## Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

| NO  | URAIAN                                                                                                                                                                                 | WAKTU                                                               | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Penyusunan RKPD                                                                                                                                                                        | Akhir bulan Mei                                                     |            |
| 2.  | Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kepada kepala daerah | Minggu 1 bulan Juni                                                 | 1 minggu   |
| 3.  | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD                                                                                                            | Pertengahan bulan Juni                                              | 6 minggu   |
| 4.  | Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD                                                                                                              | Akhir bulan Juli                                                    |            |
| 5.  | Surat edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan RKA-PPKD (Rencana Kerja Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)     | Awal bulan Agustus                                                  | 1 minggu   |
| 6.  | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD                                                                                                        | Awal Agustus sampai dengan akhir September                          | 7 minggu   |
| 7.  | Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD                                                                                                                                                 | Minggu pertama bulan Oktober                                        | 2 bulan    |
| 8.  | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah                                                                                                                                 | Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan |            |
| 9.  | Hasil evaluasi Rancangan APBD                                                                                                                                                          | 15 hari kerja (bulan Desember)                                      |            |
| 10. | Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi                                                                                                          | Paling lambat akhir Desember (31 Desember)                          |            |

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2012

### **2.1.2. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah**

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Peningkatan pelayanan di berbagai sektor sangat diharapkan, terutama di pelayanan sektor publik yang dapat direalisasikan melalui belanja modal. Dalam PMK Nomor 93 Tahun 2011, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Halim (2008) dalam Badrudin (2012), belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan / pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintah yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Menurut Halim (2007) dalam Badrudin (2012), belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya

yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian dan peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya.

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan / pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, termasuk juga dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang – barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku – buku, dan jurnal ilmiah.

#### 2.1.3. Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam UU No. 28 tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 (revisi dari UU No. 34 Tahun 2000), yang dimaksud Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No.34 tahun 2000, pajak daerah dirinci menjadi:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kab./Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Setelah dilakukan perubahan UU No.34 tahun 2000 menjadi UU No.28 tahun 2009, berikut ini merupakan rincian pajak daerah beserta tarifnya:

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor 10%
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
  4. Pajak Air Permukaan 10%
  5. Pajak Rokok 10%
- b. Pajak Kab./Kota, terdiri atas:
  1. Pajak Hotel 10%
  2. Pajak Restoran 10%

3. Pajak Hiburan 35%
4. Pajak Reklame 25%
5. Pajak Penerangan Jalan 10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
7. Pajak Parkir 30%
8. Pajak Air Tanah 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet 10%
10. PBB Perdesaan dan Perkotaan 0,3%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5%

#### **2.1.4. Retribusi Daerah**

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Timur, retribusi daerah di Jawa Timur dirinci menjadi:

1. Retribusi Provinsi, terdiri atas: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang; Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;

Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Pengelolaan Taman Hutan Rakyat R. Soerjo; Retribusi Ijin Trayek; dan Retribusi Ijin Perpanjangan Kerja.

2. Retribusi Kab./Kota, terdiri atas: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Usaha; Retribusi Gangguan; dan Retribusi Trayek.

#### **2.1.5. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan UU 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan antardaerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2009).

### **2.1.6. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut UU No.33 tahun 2004, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum tercapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawabnya, daerah penerima wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD-nya sebesar minimal 10% dari jumlah DAK yang diterimanya. Untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada daerah penerima DAK yang mempunyai selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Unsur-unsur DAK:

- Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN;
- Dialokasikan kepada daerah tertentu;
- Digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah;

- Kegiatan khusus yang didanai dengan DAK harus sesuai dengan prioritas nasional/fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN;
- DAK ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau diusulkan oleh daerah tertentu;
- DAK diperuntukan guna membiayai kegiatan fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang.

Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- 1) penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- 2) penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi **kriteria umum**, kriteria **khusus**, dan **kriteria teknis**. Sedangkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan **perhitungan indeks** berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan masing-masing kriteria sebagai berikut:

- a. *Kriteria Umum*, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Rumus:

Kemampuan keuangan daerah = penerimaan umum APBD –  
belanja pegawai daerah

Penerimaan umum APBD = PAD + DAU + (DBH – DBHDR)

Keterangan:

Belanja pegawai daerah = belanja PNSD

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

- b. *Kriteria Khusus*, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
- c. *Kriteria Teknis*, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni:

- a) Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan;
- b) Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;
- c) Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- d) Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;
- e) Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- f) Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;

- g) Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
- h) Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional;
- i) Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;
- j) Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan dirumuskan oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- k) Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan.

### **Proses Penetapan Alokasi DAK**

Dalam rangka pelaksanaan penetapan DAK, terdapat sejumlah proses yang secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dilakukan perumusan kebijakan umum DAK di APBN, termasuk didalamnya bidang-bidang yang akan didanai dari DAK.
- b) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam rangka pembahasan kegiatan khusus yang diusulkan oleh Menteri Teknis.

- c) Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- d) Menteri keuangan menetapkan alokasi DAK untuk masing-masing daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.1.7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Menurut Abdullah (2013), SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. Sebagai contoh, SiLPA di dalam APBD 2012 adalah SiLPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun anggaran 2011. Surplus terjadi apabila pendapatan dan transfer lebih besar dibandingkan dengan belanja, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan dan transfer lebih kecil dibandingkan dengan belanja. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif dimana komponen penerimaan pembiayaan lebih besar daripada komponen pengeluaran pembiayaan (Balitbang NTT, 2008).

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai), dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan (Pakpahan, 2013).

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Darwanto dan Yustikasari (2007) dalam penelitiannya menguji pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap belanja modal. Dengan data APBD kab./kota dari pulau Jawa dari 2004 – 2005, pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian parsial menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Sumarmi (2009) menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi belanja modal dengan menggunakan data APBD kab./kota di Provinsi DIY tahun 2002 – 2007. Hasil

pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan hasil secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pengujian secara parsial, PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

3. Solikin (2007) meneliti tentang hubungan antara PAD dan DAU dengan belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah APBD kab./kota se-Jawa Bali tahun 2001 – 2005. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi *product moment pearson* menunjukkan hasil bahwa PAD memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. DAU juga memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Selain itu, dengan analisis korelasi berganda menunjukkan hasil bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat terhadap belanja modal.
4. Sianturi (2010) dalam penelitiannya menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah APBD kab./kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2008. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja

modal. Hasil pengujian parsial menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

5. Ardhini (2011) dalam penelitiannya menguji pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan SiLPA terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah APBD kab./kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2008. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Sedangkan rasio efektivitas keuangan daerah dan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik.

## **2.3. Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1. Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Modal**

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pembangunan pada daerahnya. Pajak daerah ikut serta dalam membiayai pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan

untuk dana pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan Indonesia adalah berasal dari pajak yaitu 75% (Sianturi, 2010).

Nugroho (2012) mengungkapkan bahwa belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat direalisasikan melalui belanja modal, yang pada umumnya dialokasikan untuk pengadaan aset tetap sebagai investasi dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung berupa belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$H_1$  : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

### **2.3.2. Hubungan Retribusi Daerah dengan Belanja Modal**

Menurut Mardiasmo (2002), peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya sehingga pemerintah daerah ditantang untuk

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan lebih meningkatkan belanja modal. Semakin tinggi tingkat investasi (belanja) modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan peningkatan retribusi dapat meningkatkan belanja modal karena belanja modal akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian Sianturi (2010) menguatkan pernyataan tersebut bahwa retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **2.3.3. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal**

PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Saragih, 2003) sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana berasal dari pusat. DAU yang

penggunaannya diserahkan kepadadaerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah hendaknya mampu membantu persoalan ini.

Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal. Penelitian Solikin (2007) memperkuat bahwa adanya hubungan positif antara DAU dengan belanja modal dikarenakan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (yang direalisasikan melalui belanja modal) juga ikut dibiayai oleh DAU.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### **2.3.4. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Modal**

Penggunaan DAK diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal.

Penelitian Sumarmi (2009) menguatkan pernyataan tersebut bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### **2.3.5. Hubungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan Belanja Modal**

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai), dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan. (Pakpahan, 2013). Panggabean (2010) dalam Ardhini (2011) mengatakan bahwa sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penelitian Ardhini (2011) menguatkan pernyataan bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal daerah sehingga apabila terjadi kenaikan pada SiLPA, maka akan meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

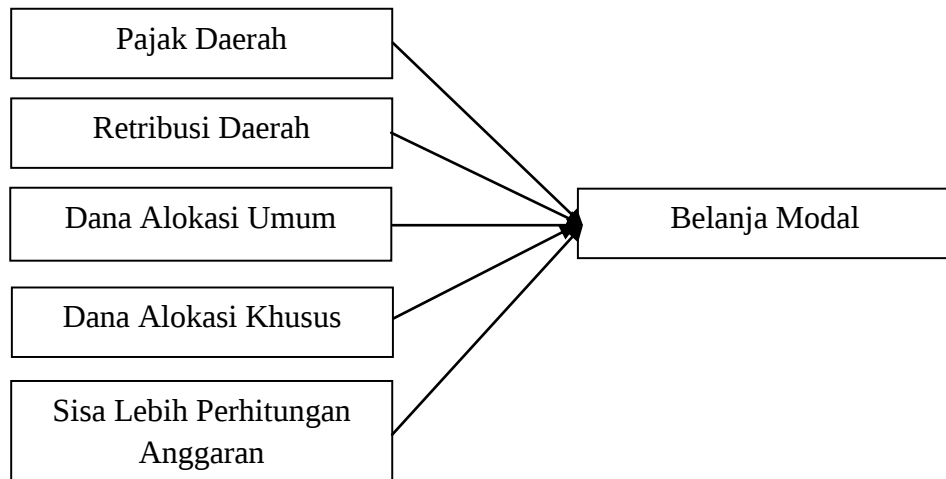
H<sub>5</sub>: SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **2.4. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian dan hipotesis di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) terhadap Belanja Modal



### BAB III

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah kab./kota di Jawa Timur ada 29 kabupaten dan 9 kota.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data laporan realisasi anggaran pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, SiLPA, dan belanja modal dalam APBD Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pusat.

### **3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah belanja modal sedangkan variabel independennya adalah pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Berikut ini pembahasan definisi operasional dan pengukuran dari variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **3.3.1. Belanja Modal**

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan investasi (menambah aset) yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset fisik lainnya. Belanja modal untuk masing – masing kab./kota dapat dilihat dari pos belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **3.3.2. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh kab./kota. Variabel ini diukur melalui besarnya anggaran pajak daerah Kab./Kota pada setiap tahun anggaran dalam Laporan APBD. Pajak daerah untuk masing – masing kab./kota dapat dilihat dari pos pajak daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **3.3.3. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan retribusi yang dipungut oleh kab./kota. Retribusi daerah untuk masing – masing kab./kota dapat dilihat dari pos retribusi daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **3.3.4. Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke kab./kota untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah. DAU untuk masing-masing kab./kota dapat dilihat dari pos DAU dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **3.3.5. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

DAK adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke kab./kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus. DAK untuk masing-masing kab./kota dapat dilihat dari pos DAK dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **3.3.6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada di APBD tahun berjalan (Abdullah, 2013). SiLPA untuk masing-masing kab./kota dapat dilihat dari pos SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran.

### **3.4. Metode Analisis Data**

#### **3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menghitung rata – rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti.

### **3.4.2. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik meliputi:

#### **3.4.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik yaitu dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model distribusi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **3.4.2.2. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (Ghozali,

2006). Multikolinieritas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila antarvariabel independen saling berkorelasi.

Dalam Ghozali (2006) multikolinieritas dapat dilihat dari:

- Nilai *tolerance* dan lawannya
- *Variance Inflation Factor* (VIF)

Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006). Apabila terjadi gejala multikolinieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang baik (Santosa dkk, 2005).

#### **3.4.2.3. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Ghozali,

2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.. Santosa, Purbayu, dan Ashari (2005) menjelaskan bahwa untuk mendeteksi gejala autokorelasi menggunakan uji Durwin-Watson (DW). Uji ini menghasilkan nilai DW hitung ( $d$ ) dan nilai DW tabel ( $d_L$  &  $d_u$ ), aturan pengujiannya adalah:

- $d < d_L$  :terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan
- $d_L < d < d_u$  :ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
- $d_u < d < 4-d_u$  :tidak ada masalah autokorelasi
- $4-d_u < d < 4-d_L$  :masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik
- $4-d_L < d$  :masalah autokorelasi serius

#### 3.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan

*variance* residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2006).

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### **3.4.3. Metode Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap belanja modal.

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$BM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \beta_5 SiLPA + e$$

dimana :

BM = Belanja Modal ( BM )

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

e = error

### 3.5. Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan pengujian secara parsial, pengujian secara simultan dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan uji statistik F. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan melihat signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *level of significant* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  maka secara simultan variabel – variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

### 3.5.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing – masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah melihat *p-value* dari masing – masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5% (Ghozali, 2006).

### 3.5.2. Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien determinasi  $R^2$  digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel – variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Semakin besar nilai  $R^2$  berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sedangkan semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel – variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi  $R^2$  adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Data Penelitian**

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukota terletak di Surabaya. Bagian utara Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan daerah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Letak Jawa Timur yang strategis memberikan keuntungan bagi daerah ini karena menjadi penghubung antara wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Provinsi Jawa Timur terletak pada 111°0' hingga 114°4' Bujur Timur dan 7°12' hingga 8°48' Lintang Selatan.

Luas wilayah daratan Provinsi Jawa Timur adalah 47.130,15 km<sup>2</sup> dan wilayah lautan seluas 110.764,28 km<sup>2</sup>. Provinsi ini terbagi menjadi 29 kabupaten, meliputi Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung, serta 9 kota, yaitu Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya.

Penelitian ini menggunakan data 29 kabupaten dan 9 kota dengan kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2007-2011 dengan 6 variabel (belanja modal, pajak

daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sehingga jumlah data pada penelitian ini sebanyak 1.140 data.

Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Data factor-faktor dan besarnya belanja modal dapat disajikan sebagai berikut:

#### **4.1.1. Pajak Daerah**

Penerimaan pajak daerah yang diterima pemerintah daerah akan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah yang direalisasikan melalui belanja modal. Pajak daerah yang diterima pemerintah daerah seluruh kab./kota di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah pajak daerah kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011 yang dapat dilihat dari tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

| <i>Tahun</i> | <i>Total Pajak Daerah</i>      |
|--------------|--------------------------------|
| 2007         | <i>Rp 902.240.788.670,63</i>   |
| 2008         | <i>Rp 1.035.612.372.041,10</i> |
| 2009         | <i>Rp 1.147.710.979.237,11</i> |
| 2010         | <i>Rp 1.331.760.193.227,21</i> |
| 2011         | <i>Rp 2.820.802.011.464.72</i> |

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun jumlah pajak daerah meningkat. Kenaikan pajak daerah dapat terjadi karena semakin banyaknya objek pajak daerah seperti hotel dan hiburan serta adanya penambahan jenis pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berlaku mulai tahun 2010.

#### **4.1.2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah berpotensi meningkatkan belanja modal yang diakibatkan oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik sehingga masyarakat mau membayar lebih tinggi retribusi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah retribusi daerah seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

| <i>Tahun</i> | <i>Total Retribusi Daerah</i>  |
|--------------|--------------------------------|
| 2007         | <i>Rp 966.252.075.632,99</i>   |
| 2008         | <i>Rp 1.106.260.614.420,79</i> |
| 2009         | <i>Rp 1.108.471.571.722,51</i> |
| 2010         | <i>Rp 918.100.766.218,38</i>   |
| 2011         | <i>Rp 1.016.307.603.508,97</i> |

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun cenderung meningkat hanya pada tahun 2010 mengalami penurunan dikarenakan pelayanan publik yang kurang bagus.

#### **4.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU merupakan dana yang bersumber dari transfer pemerintah yang penggunaannya diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah. DAU dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah DAU seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.3. berikut ini:

Tabel 4.3.

DAU Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

| <i>Tahun</i> | <i>Total DAU</i>                |
|--------------|---------------------------------|
| 2007         | <i>Rp 17.666.106.475.796,00</i> |
| 2008         | <i>Rp 19.513.024.062.400,00</i> |
| 2009         | <i>Rp 19.763.938.166.000,00</i> |
| 2010         | <i>Rp 20.093.139.854.200,00</i> |
| 2011         | <i>Rp 22.202.794.925.000,00</i> |

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun jumlah DAU meningkat. Kenaikan DAU dapat terjadi karena kebutuhan fiskal Jawa Timur yang lebih besar dibandingkan potensi fiskal.

#### 4.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang diatur oleh pemerintah pusat dan semuanya termasuk komponen belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah DAK seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.4. berikut ini:

Tabel 4.4.

DAK Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

| <i>Tahun</i> | <i>Total DAK</i>        |
|--------------|-------------------------|
| 2007         | Rp 1.340.044.500.000,00 |
| 2008         | Rp 1.676.927.300.000,00 |
| 2009         | Rp 2.120.272.088.000,00 |
| 2010         | Rp 1.808.042.850.000,00 |
| 2011         | Rp 2.173.856.575.000,00 |

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun cenderung meningkat hanya pada tahun 2010 mengalami penurunan. Jumlah DAK setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan presiden.

#### 4.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah SiLPA seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5.

SiLPA Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

| <i>Tahun</i> | <i>Total SiLPA</i>      |
|--------------|-------------------------|
| 2007         | Rp 4.014.680.676.792,80 |
| 2008         | Rp 5.058.038.553.755,13 |
| 2009         | Rp 5.181.825.014.782,70 |
| 2010         | Rp 4.318.483.219.758,28 |
| 2011         | Rp 4.210.623.443.744,22 |

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun 2007-2009 mengalami peningkatan. Tapi pada 2 tahun berikutnya secara berturut-turut mengalami penurunan. Hal ini bisa terjadi karena efisiensi anggaran atau ketidakmampuan pengoptimalan penggunaan anggaran.

#### **4.1.6. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan jenis belanja daerah yang cukup penting dikarenakan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perkembangan belanja modal yang diberikan kepada seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6.

Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

| <i>Tahun</i> | <i>Total Belanja Modal</i> |
|--------------|----------------------------|
| 2007         | Rp 5.505.140.190.365,44    |
| 2008         | Rp 6.445.978.882.009,77    |
| 2009         | Rp 7.306.296.086.713,02    |
| 2010         | Rp 5.444.398.149.845,93    |
| 2011         | Rp 6.251.091.355.686,38    |

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan dikarenakan belanja daerah lebih dialokasikan untuk belanja pegawai.

#### 4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimaksudkan dalam model penelitian, yang memperlihatkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata, dan standar deviasi dari variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, SiLPA, dan Belanja Modal.

Untuk mengetahui deskripsi data yang digunakan secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7.

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Independen

| Descriptive Statistics |     |                    |                      |                    |                    |
|------------------------|-----|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                        | N   | Minimum            | Maximum              | Mean               | Std. Deviation     |
| Pajak Daerah           | 190 | 2.643.875.425,00   | 1.488.358.147.753,27 | 38.095.401.813,69  | 124.811.452.498,12 |
| Retribusi Daerah       | 190 | 2.274.211.802,75   | 209.834.317.887,85   | 26.923.119.112,87  | 29.381.672.599,85  |
| DAU                    | 190 | 188.025.000.000,00 | 1.058.648.472.000,00 | 522.415.807.807,35 | 176.272.044.927,03 |
| DAK                    | 190 | 903.700.000,00     | 108.468.200.000,00   | 47.995.491.121,05  | 23.175.578.082,68  |
| SiLPA                  | 190 | 7.948.417.368,86   | 1.579.082.113.082,00 | 119.913.952.150,23 | 175.798.030.743,93 |
| Belanja Modal          | 190 | 44.601.848.936,00  | 1.143.038.576.007,00 | 162.910.024.550,46 | 119.321.886.848,82 |
| Valid N (listwise)     | 190 |                    |                      |                    |                    |

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2013

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Rata – rata dari pajak daerah adalah Rp38.095.401.813,69 dengan standar deviasi 124.811.452.498,12. Nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan nilai rata – ratanya menunjukkan bahwa data pajak daerah mengalami fluktuasi yang cukup besar, terbukti dengan perbedaan nilai tertinggi dan terendah pajak daerah yang cukup besar. Nilai tertinggi pajak daerah adalah Rp1.488.358.147.753,27 terdapat di APBD kota Surabaya tahun 2011. Pada tahun 2011, terdapat tambahan 2 jenis pajak daerah yang dikenakan kota Surabaya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kota Surabaya merupakan salah satu pusat industri dan ikon bisnis terkemuka di Indonesia yang memiliki banyak perusahaan – perusahaan industri berskala besar, sedang, maupun kecil yang berlokasi dan tengah beroperasi di Surabaya. Oleh

karena itu, adanya kedua jenis pajak daerah baru tersebut memberikan kontribusi penambahan pajak daerah yang sangat besar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp498.640.108.489 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp416.314.633.814. Nilai terendah pajak daerah adalah Rp2.643.875.425,00 terdapat di APBD Kab.Sampang pada tahun 2007. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang sangat lambat jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal itu berimbas pada kemajuan kabupaten dan objek pajak daerah, misal sedikitnya hotel. Pada tahun 2007, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah juga belum berlaku sehingga pajak kab.Sampang sangat kecil bahkan jauh dari rata - rata.

2. Rata – rata dari retribusi daerah adalah Rp26.923.119.112,87 dengan standar deviasi 29.381.672.599,85. Standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan nilai rata – ratanya menunjukkan bahwa data retribusi daerah mengalami fluktuasi. Nilai tertinggi retribusi daerah adalah Rp209.834.317.887,85 terdapat di APBD kota Surabaya pada tahun 2011. Salah satu kebijakan pemerintah kota Surabaya pada tahun 2011 adalah meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, masyarakat pun mau membayar retribusi lebih tinggi. Nilai terendah retribusi daerah adalah Rp2.274.211.802,75 terdapat di APBD Kota Batu pada tahun 2007. Kota Batu di kelilingi beberapa gunung dan bukit sehingga cukup terpencil. Kota yang memiliki panorama alam indah

ini tidak diimbangi dengan kualitas layanan publik seperti jalan menuju Kota Batu yang kurang bagus sehingga pendapatan retribusi daerah pun kecil karena masyarakat tentu tidak mau membayar retribusi lebih tinggi jika pelayanannya kurang baik. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun pendapatan retribusi Kota Batu mengalami peningkatan seiring meningkatkannya kualitas pelayanan publik.

3. Rata – rata dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Rp522.415.807.807,35 dengan standar deviasi 176.272.044.927,03. Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata – ratanya menunjukkan bahwa data DAU tidak mengalami fluktuasi atau homogen. Nilai tertinggi DAU adalah Rp1.058.648.472.000,00 terdapat di APBD Kab.Jember pada tahun 2011. Alokasi DAU relatif besar terhadap suatu daerah jika daerah tersebut potensi fiskalnya kecil tapi kebutuhan fiskalnya besar. Seperti yang terjadi di kab.Jember tahun 2011. PAD kabupaten ini hanya Rp182.494.390.159 sedangkan belanja daerahnya mencapai Rp1.983.268.499.680. Nilai terendah DAU adalah Rp188.025.000.000,00 terdapat di APBD Kota Batu pada tahun 2007. PAD kabupaten ini Rp13.283.274.381 dan belanja daerahnya Rp246.661.476.210. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, meskipun potensi fiskalnya lebih kecil daripada kebutuhan fiskal tapi karena kebutuhan fiskalnya juga tidak cukup besar maka DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat pun sedikit.

4. Rata-rata dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Rp47.995.491.121,05 dengan standar deviasi 23.175.578.082,68. Nilai standar deviasi yang lebih rendah daripada nilai rata – ratanya berarti ukuran penyebaran data DAK homogeny. Nilai tertinggi DAK adalah Rp108.468.200.000,00 terdapat di APBD Kab.Malang pada tahun 2011 dan nilai terendah DAK adalah Rp903.700.000,00 terdapat di APBD Kota Kediri pada tahun 2010. Jumlah DAK setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan presiden.
5. Rata-rata dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah Rp119.913.952.150,23 dengan standar deviasi 175.798.030.743,93. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata – ratanya menunjukkan data SiLPA mengalami fluktuasi. Nilai tertinggi SiLPA adalah Rp1.579.082.113.082,00 terdapat di APBD Kota Surabaya pada tahun 2009. SiLPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun lalu atau bisa disebut sisa anggaran tahun lalu. Nilai SiLPA yang terlalu besar ini menggambarkan bahwa perencanaan kegiatan yang tidak akurat dan kurang matang pada tahun 2008. Nilai terendah SiLPA adalah Rp7.948.417.368,86 terdapat di APBD Kab.Ngawi pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2008 pemerintah Kab.Ngawi telah efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran sehingga menghasilkan nilai SILPA yang kecil.
6. Rata-rata dari belanja modal adalah Rp162.910.024.550,46 dengan standar deviasi 119.321.886.848,82. Nilai standar deviasi lebih besar

dibandingkan dengan nilai rata – ratanya berarti data belanja modal mengalami fluktuasi. Nilai tertinggi belanja modal adalah Rp1.143.038.576.007,00 pada kota Surabaya 2009. Pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan (peningkatan hutang) yang melanda beberapa negara di kawasan Eropa sehingga pada tahun 2009 belanja modal kota Surabaya sangat besar untuk pemulihan perekonomian. Kota Surabaya merupakan kota yang cukup maju dengan kegiatan perdagangan (terutama ekspor di daerah Eropa) dan investasi sehingga perlu ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur untuk memperlancar kegiatan investasi dan transportasi barang ekspor dari kota Surabaya. Sehingga kota Surabaya meningkatkan belanja modalnya terutama pada belanja gedung dan bangunan dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Nilai terendah belanja modal adalah Rp44.601.848.936,00 terdapat di APBD Kota Madiun pada tahun 2007. Kota Madiun termasuk kota yang cukup maju dikarenakan posisi yang strategis berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta sehingga ditetapkan sebagai pusat ekonomi untuk daerah sekitarnya. Belanja daerah kota Madiun pada tahun tersebut cukup besar yaitu Rp277.179.277.875 tapi sayangnya lebih difokuskan pada belanja pegawai yang mencapai Rp176.245.665.070,5.

#### **4.3. Uji Asumsi Klasik**

Penggunaan alat statistik regresi linear berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Pengujian atas asumsi klasik terdiri atas (1) uji normalitas data, (2) multikolinieritas, (3) autokorelasi, dan (4) heteroskedastisitas.

#### 4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik yaitu analisis grafik *normal probability plot*. Data dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Dengan melihat tampilan grafik *normal probability plot* menunjukkan titik – titik menyebar di sekitar dan searah dengan garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sehingga grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1.



## Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Diolah (2013)

### 4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (Ghozali, 2006). Metode yang digunakan untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) yang dapat dihitung melalui proses SPSS. Batas dari *tolerance value* adalah di bawah 0,10 dan batas VIF di atas 10 maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.8. menunjukkan hasil dari pengujian multikolinieritas. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan *tolerance value* masing – masing variabel independen yang berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, model regresi terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 4.8.

## Hasil Uji Multikolinieritas

| <i>Variabel</i>         | <i>Tolerance</i> | <i>VIF</i>   | <i>Keterangan</i>                      |
|-------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------|
| <i>Pajak Daerah</i>     | <i>0,361</i>     | <i>2,771</i> | <i>Tidak terjadi multikolinieritas</i> |
| <i>Retribusi Daerah</i> | <i>0,206</i>     | <i>4,863</i> | <i>Tidak terjadi multikolinieritas</i> |
| <i>DAU</i>              | <i>0,510</i>     | <i>1,963</i> | <i>Tidak terjadi multikolinieritas</i> |
| <i>DAK</i>              | <i>0,578</i>     | <i>1,729</i> | <i>Tidak terjadi multikolinieritas</i> |
| <i>SiLPA</i>            | <i>0,388</i>     | <i>2,580</i> | <i>Tidak terjadi multikolinieritas</i> |

Sumber: Data diolah (2013)

#### 4.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t - 1$  (sebelumnya). Pengujian ini menggunakan uji Durbin – Watson. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.9. Nilai Durbin – Watson (*Dw Test*) akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%. Bila  $d_u < d < (4-d_u)$  maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan jumlah observasi sebanyak  $N = 190$  dan jumlah variabel bebas ( $k = 5$ ), maka diketahui *Dw Test* yang diperoleh sebesar 1,927 berada di antara  $d_u = 1,817$  dan  $(4-d_u) = 2,183$  sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.9.

## Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |                 |                          |                                   |                      |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Model</i>               | <i>R</i>          | <i>R Square</i> | <i>Adjusted R Square</i> | <i>Std. Error of the Estimate</i> | <i>Durbin-Watson</i> |
| 1                          | .859 <sup>a</sup> | .738            | .731                     | 61884016268.51988                 | 1.927                |

- a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak Daerah, DAU, Retribusi Daerah
- b. Dependent variable: Belanja Modal

Sumber: Data Diolah (2013)

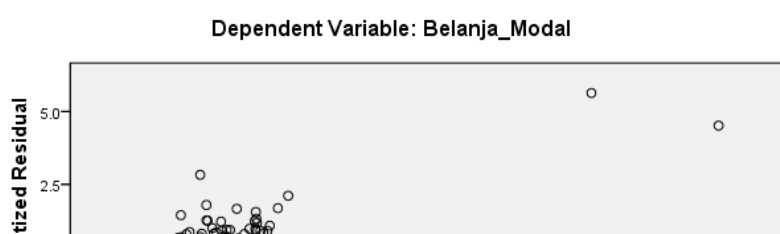
#### 4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

Gambar 4.2.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Sumber : Data Diolah (2013)

#### **4.4. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal.

Hasil uji regresi linear berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.10.

Hasil Estimasi Regresi

Coefficients<sup>a</sup>

| Model            | Unstandardized Coefficients |                 | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|                  | B                           | Std. Error      | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)     | 25871139430.532             | 14350456793.946 |                           | 1.803  | .073 |                         |       |
| Pajak_Daerah     | .127                        | .060            | .132                      | 2.109  | .036 | .361                    | 2.771 |
| Retribusi_Daerah | .114                        | .338            | .028                      | .338   | .736 | .206                    | 4.863 |
| DAU              | .092                        | .036            | .137                      | 2.585  | .011 | .510                    | 1.963 |
| DAK              | .508                        | .255            | .099                      | 1.990  | .048 | .578                    | 1.729 |
| SiLPA            | .471                        | .041            | .693                      | 11.442 | .000 | .388                    | 2.580 |

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

Sumber : Data Diolah (2013)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$BM = 25871139430,532 + 0,127PD + 0,114RD + 0,092DAU + 0,508DAK + 0,471SiLPA$$

Persamaan regresi di atas menyatakan bahwa:

- Konstanta sebesar 25.871.139.430,532 menyatakan bahwa apabila pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan SiLPA konstan maka belanja modal akan bernilai 25.871.139.430,532.
- Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,127 menyatakan bahwa apabila pajak daerah meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar 0,127satuan.
- Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 0,114 menyatakan bahwa apabila retribusi daerah meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar 0,114satuan.

- Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,092 menyatakan bahwa apabila DAU meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar 0,092 satuan.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,508 menyatakan bahwa apabila DAK meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar 0,508 satuan.
- Koefisien regresi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 0,471 menyatakan bahwa apabila SiLPA meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar 0,471 satuan.

#### **4.5. Pengujian Hipotesis**

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Berdasarkan pengujian SPSS, diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 103.732 dengan signifikansi 0,000 yang berada di bawah nilai signifikansi yang digunakan 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ), yang berarti bahwa variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, dan SiLPA secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Belanja Modal. Dengan demikian model yang digunakan dalam

penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan belanja modal dalam APBD.

#### **4.4.1. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)**

Untuk mengetahui secara detail pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan pengujian secara parsial dengan uji t.

##### **4.4.1.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal**

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,127 dan nilai probabilitas sebesar 0,036. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 artinya pajak daerah secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan “**pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal**” didukung.

##### **4.4.1.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal**

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,114 dan nilai probabilitas sebesar 0,736. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan “**retribusi**

**daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal” tidak didukung.**

#### **4.4.1.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal**

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel DAU mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,092 dan nilai probabilitas sebesar 0,011. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya DAU secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan **“DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal” didukung.**

#### **4.4.1.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal**

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel DAK mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,508 dan nilai probabilitas sebesar 0,048. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan **“DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal” didukung.**

#### 4.4.1.5. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel SiLPA mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,471 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya SiLPA secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang menyatakan “**SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal**” didukung.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diringkas mengenai uji hipotesis dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Tabel 4.11.

#### Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

| No. | Hipotesis                                                   | Probabilitas   | Hasil Uji |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1.  | Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal     | $0,036 < 0,05$ | Diterima  |
| 2.  | Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal | $0,736 > 0,05$ | Ditolak   |
| 3.  | DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal              | $0,011 < 0,05$ | Diterima  |
| 4.  | DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal              | $0,048 < 0,05$ | Diterima  |
| 5.  | SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal            | $0,000 < 0,05$ | Diterima  |

#### 4.6. Hasil Koefisien Determinasi $R^2$

Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen, digunakan *adjusted R – square* sebagai koefisien determinasi. Dari pengujian ini dapat

diketahui tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*) nya.

Tabel 4.12.

#### Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .859 <sup>a</sup> | .738     | .731              | 61884016268.51988          |

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak\_Daerah, DAU, Retribusi\_Daerah

Sumber : Data Diolah (2013)

Koefisien determinasi  $R^2$  digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel – variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dalam tabel 4.6, besarnya *adjusted R – square* adalah 0,731. Hal ini berarti 73,1% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh 5 variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan SiLPA. Sedangkan sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel - variabel yang lain di luar model.

#### 4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.7.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis, pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja

modal. Hal ini disebabkan karena pajak daerah juga digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Jika dibandingkan dengan penelitian Sumarmi (2009) yang meneliti PAD tanpa memisahkan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil penelitian ini sebanding. Jika PAD (salah satunya adalah pajak daerah) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana dan pembangunan guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sianturi (2010). Jika pajak daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah.

#### **4.7.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal**

Pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian Sumarmi (2009). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU 28 tahun 2009). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil

penelitian Sianturi (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Titik tekan dari retribusi daerah adalah adanya imbalan langsung yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun dalam praktek di lapangan, masih banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah. Masih ada ketidakcocokan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima. Masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja atau bahkan masih buruk kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, retribusi daerah sebagai salah satu PAD belum memberikan kontribusi yang cukup untuk belanja modal.

#### **4.7.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal**

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh signifikan DAU terhadap belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh DAU

tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2009) dengan sampel kab./kota di DIY. Tujuan awal DAU adalah untuk pemerataan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka DAU yang diperoleh tinggi dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka DAU yang diperoleh daerah bersangkutan akan rendah. DIY memiliki kemandirian daerah kab./kota yang kuat sehingga tidak bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai alokasi belanja modal daerah.

#### **4.7.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal**

Pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penggunaan DAK diatur oleh pemerintah pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sumarmi (2009) yang menyatakan bahwa DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan – kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum tercapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat direalisasikan melalui belanja modal.

#### **4.7.5. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal**

Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan publik. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai), dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan. (Pakpahan, 2013). Sehingga apabila terjadi kenaikan pada SiLPA maka akan meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif dimana komponen

penerimaan pembiayaan lebih besar daripada komponen pengeluaran pembiayaan (Balitbang NTT, 2008). Namun, menurut Kumorotomo (2010), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada seperti beberapa proyek yang tertunda, akan membuat pemerintah pusat menilai adanya kegagalan kerja pemerintah daerah. Sehingga akan berimbas pada pengurangan alokasi dana pusat seperti DAU dan DAK. Itu berbahaya, karena dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, maka akan meningkatkan belanja modal.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, tidak akan mempengaruhi belanja modal.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAU, maka akan meningkatkan belanja modal.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAK, maka akan meningkatkan belanja modal.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada SiLPA, maka akan meningkatkan belanja modal.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut:

1. Periode penelitian hanya 5 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2011 sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh.

2. Dalam penelitian ini, variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Modal hanya 5 variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) saja, sementara dimungkinkan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Modal. Angka *adjusted R-square* atau koefisien determinasi adalah 0,731. Hal ini berarti 73,1% variasi variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh 5 variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan SiLPA, sedangkan sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar model.

### 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang relevan, misalnya tahun 2007-2012.
2. Penambahan variabel independen yang mungkin mempengaruhi Belanja Modal, misalnya jenis – jenis atau ukuran penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan, seperti jumlah penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk yang

lebih banyak tentu membutuhkan belanja modal lebih banyak yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik daripada daerah dengan jumlah penduduk sedikit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Syukriy. 2013. Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah ~ Apakah Saling Berhubungan?. Diperoleh di <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apakah-saling-berhubungan/> pada tanggal 1 Januari 2013.

Ardhini, *Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Prespektif Teori Keagenan: Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Badrudin, Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012.

Balitbang Provinsi NTT, *Analisis tentang Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Litbang, Vol. IV No. 03, 2008, Hal. 177-192.

Darise, Nurlan, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Indeks, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*, Indeks, Jakarta, 2009.

Darwanto dan Yustikasari, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Symposium Nasional Akuntansi X Universitas Hassanudin Makasar, Juli 2007, Hal. 1-25.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, *Ringkasan Eksekutif Analisa Pengeluaran Publik Jawa Timur 2011*, Jawa Timur, 2011.

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*: Edisi 4, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Kawedar, dkk, *Akuntansi Sektor Publik : Buku 1*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja dan SiLPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah*, Makalah dipaparkan pada Konferensi Administrasi Negara ke-3, Bandung, 2010.

- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Nugroho, Agung, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Nugroho, Fajar, Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Pakpahan, Hombar, 2013, Pelaksanaan Anggaran Daerah (APBD), diperoleh di <http://koranharian.blogspot.com/2013/02/pelaksanaan-anggaran-daerah-apbd.html>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Santosa, Purbayu, dan Ashari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sianturi, Agave, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2010.

Solikin, Ikin, *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*, Skripsi S-1, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2007.

Sumarmi, Saptaningsih, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*, Paper Akmenika UPY, Vol. 4, 2009, Hal. 55 – 66

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **LAMPIRAN 1**

### **Data Variabel Independen dan Dependen**

Tahun 2007

Tahun 2008

|                  | Pajak Daerah          | Retribusi Daerah      | DAU                      | DAK                     | SILPA                   | Belanja Modal           |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kab.Bangkalan    | Rp 6,524,048,029.00   | Rp 15,776,273,397.37  | Rp 430,851,000,000.00    | Rp 41,518,000,000.00    | Rp 80,987,584,655.09    | Rp 149,059,004,121.00   |
| Kab.Banyuwangi   | Rp 17,929,227,800.28  | Rp 13,658,774,174.83  | Rp 698,228,000,000.00    | Rp 60,136,800,000.00    | Rp 163,721,815,335.04   | Rp 235,313,957,531.80   |
| Kab.Blitar       | Rp 11,077,754,474.00  | Rp 587,733,000,000.00 | Rp 587,733,000,000.00    | Rp 50,935,000,000.00    | Rp 48,861,203,746.82    | Rp 185,122,091,620.00   |
| Kab.Bojonegoro   | Rp 10,736,659,695.21  | Rp 31,790,623,050.00  | Rp 552,361,000,000.00    | Rp 10,042,000,000.00    | Rp 88,141,651,485.23    | Rp 177,387,883,789.00   |
| Kab.Bondowoso    | Rp 4,614,174,980.00   | Rp 15,969,316,439.66  | Rp 397,436,000,000.00    | Rp 36,561,000,000.00    | Rp 64,438,124,961.03    | Rp 89,000,334,561.00    |
| Kab.Gresik       | Rp 54,447,121,819.36  | Rp 43,141,563,115.36  | Rp 456,268,079,400.00    | Rp 9,338,000,000.00     | Rp 82,954,150,564.80    | Rp 92,673,324,389.22    |
| Kab.Jember       | Rp 21,533,246,972.00  | Rp 30,630,781,249.00  | Rp 861,126,000,000.00    | Rp 66,222,800,000.00    | Rp 102,178,579,534.80   | Rp 230,075,544,709.00   |
| Kab.Jombang      | Rp 14,171,546,117.07  | Rp 12,429,117,674.50  | Rp 537,081,999,400.00    | Rp 9,893,000,000.00     | Rp 99,835,085,160.50    | Rp 98,674,207,637.00    |
| Kab.Kediri       | Rp 16,869,299,569.76  | Rp 29,191,177,599.34  | Rp 635,830,000,000.00    | Rp 10,032,000,000.00    | Rp 120,571,385,050.81   | Rp 173,492,108,270.51   |
| Kab.Lamongan     | Rp 11,993,879,168.96  | Rp 19,618,544,117.00  | Rp 540,603,000,000.00    | Rp 59,862,000,000.00    | Rp 66,630,579,005.11    | Rp 148,060,249,433.00   |
| Kab.Lumajang     | Rp 8,924,529,135.00   | Rp 49,883,079,768.75  | Rp 479,591,000,000.00    | Rp 47,043,000,000.00    | Rp 73,800,963,940.65    | Rp 155,409,922,735.00   |
| Kab.Madigan      | Rp 6,106,869,954.80   | Rp 15,330,543,611.99  | Rp 421,464,000,000.00    | Rp 38,276,400,000.00    | Rp 44,291,586,658.36    | Rp 112,934,359,266.00   |
| Kab.Magetan      | Rp 5,490,294,407.85   | Rp 21,217,877,289.00  | Rp 451,962,000,000.00    | Rp 44,993,300,000.00    | Rp 57,135,060,109.12    | Rp 132,632,389,185.00   |
| Kab.Malang       | Rp 26,393,015,873.00  | Rp 36,285,420,549.04  | Rp 880,921,000,000.00    | Rp 68,184,000,000.00    | Rp 206,493,330,630.17   | Rp 375,243,155,143.00   |
| Kab.Mojokerto    | Rp 22,174,627,856.09  | Rp 13,800,437,501.00  | Rp 450,454,000,000.00    | Rp 44,985,000,000.00    | Rp 142,095,342,736.00   | Rp 120,159,659,221.00   |
| Kab.Mojokerto    | Rp 7,545,575,555.35   | Rp 34,742,063,478.61  | Rp 539,899,000,000.00    | Rp 45,041,000,000.00    | Rp 89,414,958,294.27    | Rp 190,931,153,701.00   |
| Kab.Nganjuk      | Rp 6,348,835,434.00   | Rp 6,864,895,931.00   | Rp 493,983,000,000.00    | Rp 28,355,800,000.00    | Rp 41,727,735,688.99    | Rp 93,062,428,349.00    |
| Kab.Ngawi        | Rp 3,677,694,217.00   | Rp 11,156,655,423.90  | Rp 371,997,000,000.00    | Rp 49,112,000,000.00    | Rp 53,702,871,952.09    | Rp 105,919,678,556.95   |
| Kab.Pacitan      | Rp 5,144,233,276.83   | Rp 16,201,760,709.13  | Rp 410,702,000,000.00    | Rp 42,622,000,000.00    | Rp 100,733,666,776.16   | Rp 127,754,210,823.08   |
| Kab.Pamekasan    | Rp 40,135,204,867.00  | Rp 16,604,795,101.00  | Rp 537,700,579,200.00    | Rp 53,612,900,000.00    | Rp 69,672,816,446.59    | Rp 107,019,983,825.00   |
| Kab.Pasuruan     | Rp 8,616,215,845.50   | Rp 21,512,867,589.85  | Rp 490,926,000,000.00    | Rp 48,708,000,000.00    | Rp 30,829,240,814.98    | Rp 111,724,896,682.00   |
| Kab.Probolinggo  | Rp 7,290,814,791.00   | Rp 15,928,942,873.00  | Rp 484,750,000,000.00    | Rp 52,388,000,000.00    | Rp 84,555,834,843.04    | Rp 151,258,397,552.50   |
| Kab.Sampang      | Rp 2,643,875,425.00   | Rp 5,708,045,082.00   | Rp 370,902,000,000.00    | Rp 43,856,000,000.00    | Rp 189,473,696,080.60   | Rp 157,297,626,081.07   |
| Kab.Sidoarjo     | Rp 93,294,361,178.00  | Rp 71,516,045,718.00  | Rp 588,072,999,996.00    | Rp 8,946,000,000.00     | Rp 188,605,216,457.53   | Rp 268,041,940,292.00   |
| Kab.Situbondo    | Rp 6,385,338,900.00   | Rp 6,873,729,823.50   | Rp 383,831,000,000.00    | Rp 37,683,000,000.00    | Rp 104,732,411,334.86   | Rp 127,958,806,776.00   |
| Kab.Sumenep      | Rp 5,138,477,062.00   | Rp 15,474,723,962.00  | Rp 492,667,000,000.00    | Rp 10,222,000,000.00    | Rp 175,323,821,171.00   | Rp 129,099,859,123.00   |
| Kab.Trenggalek   | Rp 5,156,011,966.00   | Rp 10,794,249,305.00  | Rp 431,681,000,000.00    | Rp 51,011,000,000.00    | Rp 80,109,098,772.75    | Rp 105,773,104,962.00   |
| Kab.Tuban        | Rp 38,496,293,218.00  | Rp 19,599,494,632.03  | Rp 470,385,000,000.00    | Rp 9,685,000,000.00     | Rp 159,696,290,594.51   | Rp 169,447,396,190.00   |
| Kab.Tulungagung  | Rp 11,628,194,181.00  | Rp 29,711,826,182.00  | Rp 564,916,000,000.00    | Rp 52,302,100,000.00    | Rp 43,227,257,684.50    | Rp 124,247,728,890.00   |
| Kota Batu        | Rp 5,389,815,393.00   | Rp 2,274,211,802.75   | Rp 188,025,000,000.00    | Rp 26,712,500,000.00    | Rp 23,406,782,999.89    | Rp 82,415,344,870.00    |
| Kota Blitar      | Rp 3,387,092,809.50   | Rp 10,713,481,974.05  | Rp 194,040,000,000.00    | Rp 26,933,900,000.00    | Rp 28,919,539,211.71    | Rp 84,469,836,875.50    |
| Kota Kediri      | Rp 11,494,201,135.25  | Rp 49,301,512,911.00  | Rp 350,377,000,000.00    | Rp 23,891,000,000.00    | Rp 83,793,395,744.29    | Rp 193,731,023,485.00   |
| Kota Madiun      | Rp 7,864,616,849.45   | Rp 9,389,439,796.00   | Rp 240,348,137,000.00    | Rp 18,613,000,000.00    | Rp 39,582,666,430.87    | Rp 44,601,848,936.00    |
| Kota Malang      | Rp 37,581,796,778.62  | Rp 23,164,492,762.00  | Rp 417,300,000,000.00    | Rp 26,934,810,995.53    | Rp 46,013,481,995.53    | Rp 149,646,823,132.00   |
| Kota Mojokerto   | Rp 4,989,660,287.75   | Rp 14,862,195,247.00  | Rp 212,039,000,000.00    | Rp 20,558,000,000.00    | Rp 26,534,810,859.60    | Rp 45,245,894,570.00    |
| Kota Pasuruan    | Rp 4,755,355,878.00   | Rp 7,020,917,657.00   | Rp 203,153,000,000.00    | Rp 30,757,000,000.00    | Rp 48,520,108,570.40    | Rp 93,511,953,103.00    |
| Kota Probolinggo | Rp 5,456,891,548.00   | Rp 21,163,819,195.33  | Rp 226,917,680,800.00    | Rp 26,669,000,000.00    | Rp 27,438,016,162.11    | Rp 118,250,951,022.81   |
| Kota Surabaya    | Rp 340,833,935,422.00 | Rp 176,785,881,531.00 | Rp 639,590,000,000.00    | Rp 7,408,900,000.00     | Rp 836,530,514,333.00   | Rp 248,491,110,956.00   |
| <b>Total</b>     |                       |                       |                          |                         |                         |                         |
|                  | Rp 902,240,788,670.63 | Rp 966,252,075,632.99 | Rp 17,686,106,475,796.00 | Rp 1,340,044,500,000.00 | Rp 4,014,680,676,792.80 | Rp 5,505,140,190,365.44 |

Tahun 2009

|                  | Pajak Daerah            | Retribusi Daerah        | DAU                      | DAK                     | SILPA                   | Belanja Modal           |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kab.Bangkalan    | Rp 6,998,126,963.00     | Rp 17,727,223,120.00    | Rp 472,871,889,000.00    | Rp 54,812,000,000.00    | Rp 54,973,766,922.14    | Rp 187,756,561,393.15   |
| Kab.Banyuwangi   | Rp 20,484,607,838.48    | Rp 20,331,387,586.96    | Rp 771,131,582,000.00    | Rp 56,323,800,000.00    | Rp 169,275,540,399.70   | Rp 161,726,444,798.45   |
| Kab.Blitar       | Rp 10,673,123,845.00    | Rp 25,375,309,418.00    | Rp 634,378,020,000.00    | Rp 67,376,000,000.00    | Rp 89,341,357,550.62    | Rp 267,402,110,683.00   |
| Kab.Bojonegoro   | Rp 11,593,301,616.00    | Rp 36,608,317,451.30    | Rp 586,814,115,000.00    | Rp 10,042,000,000.00    | Rp 34,204,676,216.50    | Rp 277,733,119,706.00   |
| Kab.Bondowoso    | Rp 5,230,451,800.00     | Rp 19,272,445,957.33    | Rp 447,561,068,000.00    | Rp 15,187,000,000.00    | Rp 85,240,299,891.86    | Rp 88,554,947,513.71    |
| Kab.Gresik       | Rp 60,863,444,601.81    | Rp 50,093,282,055.71    | Rp 532,824,783,000.00    | Rp 22,404,000,000.00    | Rp 94,575,560,384.05    | Rp 110,116,919,785.04   |
| Kab.Jember       | Rp 24,222,730,280.70    | Rp 65,539,640,136.55    | Rp 942,532,809,000.00    | Rp 66,485,000,000.00    | Rp 82,252,862,612.47    | Rp 274,510,234,216.00   |
| Kab.Jombang      | Rp 15,642,628,867.23    | Rp 67,236,665,259.00    | Rp 591,773,863,400.00    | Rp 26,024,000,000.00    | Rp 159,320,574,568.59   | Rp 143,217,468,614.60   |
| Kab.Kediri       | Rp 18,442,762,832.00    | Rp 27,546,339,526.04    | Rp 682,047,289,000.00    | Rp 10,032,000,000.00    | Rp 201,663,043,527.25   | Rp 217,954,691,211.00   |
| Kab.Lamongan     | Rp 14,271,468,396.00    | Rp 24,300,382,597.00    | Rp 599,292,383,000.00    | Rp 75,972,000,000.00    | Rp 54,572,111,608.18    | Rp 191,930,727,365.00   |
| Kab.Lumajang     | Rp 9,700,909,629.06     | Rp 33,422,060,139.00    | Rp 537,879,076,000.00    | Rp 55,841,000,000.00    | Rp 89,825,776,069.56    | Rp 144,194,210,804.00   |
| Kab.Madiun       | Rp 6,821,298,297.25     | Rp 14,636,083,220.84    | Rp 468,644,296,000.00    | Rp 77,899,000,000.00    | Rp 40,356,167,209.84    | Rp 119,018,505,531.00   |
| Kab.Magetan      | Rp 6,496,829,402.49     | Rp 21,138,934,906.58    | Rp 490,163,947,000.00    | Rp 54,272,000,000.00    | Rp 80,202,755,116.66    | Rp 111,033,949,459.00   |
| Kab.Malang       | Rp 30,357,571,883.00    | Rp 18,479,089,957.00    | Rp 967,647,192,000.00    | Rp 89,739,000,000.00    | Rp 134,643,070,790.00   | Rp 331,809,507,943.00   |
| Kab.Mojokerto    | Rp 25,930,987,213.54    | Rp 17,913,194,002.35    | Rp 501,520,436,000.00    | Rp 58,977,000,000.00    | Rp 211,559,553,685.03   | Rp 204,842,512,477.00   |
| Kab.Nganjuk      | Rp 8,351,985,594.86     | Rp 38,101,751,482.44    | Rp 580,060,073,000.00    | Rp 60,359,000,000.00    | Rp 103,558,715,265.76   | Rp 163,926,064,222.00   |
| Kab.Ngawi        | Rp 8,391,451,764.00     | Rp 7,999,256,444.00     | Rp 544,877,704,000.00    | Rp 53,410,000,000.00    | Rp 38,592,883,862.83    | Rp 155,168,373,149.30   |
| Kab.Pacitan      | Rp 4,170,577,618.00     | Rp 12,365,333,135.03    | Rp 406,718,314,000.00    | Rp 61,396,000,000.00    | Rp 72,507,243,761.80    | Rp 129,100,543,812.00   |
| Kab.Pamekasan    | Rp 5,929,501,643.00     | Rp 19,828,940,667.25    | Rp 447,934,892,000.00    | Rp 55,573,000,000.00    | Rp 103,492,194,832.68   | Rp 134,092,847,414.00   |
| Kab.Pasuruan     | Rp 44,098,165,619.54    | Rp 19,672,201,795.50    | Rp 599,547,975,000.00    | Rp 76,241,000,000.00    | Rp 130,194,808,342.49   | Rp 161,925,117,238.00   |
| Kab.Ponorogo     | Rp 9,858,329,841.00     | Rp 23,871,568,766.58    | Rp 538,559,997,000.00    | Rp 62,927,000,000.00    | Rp 94,953,919,221.46    | Rp 178,118,933,515.70   |
| Kab.Probolinggo  | Rp 8,324,117,940.00     | Rp 19,525,821,204.00    | Rp 531,084,756,000.00    | Rp 52,388,000,000.00    | Rp 76,517,116,069.07    | Rp 148,397,069,713.25   |
| Kab.Sampang      | Rp 3,079,469,026.00     | Rp 10,151,748,432.50    | Rp 422,388,032,000.00    | Rp 52,769,700,000.00    | Rp 213,615,453,613.26   | Rp 202,002,365,563.00   |
| Kab.Sidoarjo     | Rp 111,960,199,960.00   | Rp 77,450,960,010.00    | Rp 643,016,063,000.00    | Rp 8,946,000,000.00     | Rp 214,089,134,970.46   | Rp 267,982,633,847.16   |
| Kab.Situbondo    | Rp 7,286,173,468.00     | Rp 11,469,267,570.50    | Rp 427,846,472,000.00    | Rp 47,784,000,000.00    | Rp 127,252,537,352.47   | Rp 134,471,005,343.48   |
| Kab.Sumenep      | Rp 6,090,310,650.00     | Rp 18,832,589,782.00    | Rp 552,279,665,000.00    | Rp 9,199,800,000.00     | Rp 183,641,254,605.80   | Rp 164,065,106,417.21   |
| Kab.Trenggalek   | Rp 6,120,714,723.00     | Rp 8,946,429,181.00     | Rp 465,748,300,000.00    | Rp 63,037,000,000.00    | Rp 126,970,422,691.05   | Rp 151,951,693,871.00   |
| Kab.Tuban        | Rp 42,335,581,010.00    | Rp 17,240,766,648.00    | Rp 512,348,506,000.00    | Rp 21,321,000,000.00    | Rp 224,513,839,628.49   | Rp 268,975,962,513.00   |
| Kab.Tulungagung  | Rp 11,499,718,475.60    | Rp 37,001,475,210.03    | Rp 628,424,932,000.00    | Rp 66,075,000,000.00    | Rp 35,262,936,566.73    | Rp 120,086,674,765.06   |
| Kota Batu        | Rp 6,841,187,889.00     | Rp 2,757,399,233.00     | Rp 215,977,808,000.00    | Rp 30,520,000,000.00    | Rp 51,573,972,725.08    | Rp 79,735,000,341.00    |
| Kota Blitar      | Rp 3,706,208,387.00     | Rp 20,563,760,213.90    | Rp 217,165,721,000.00    | Rp 32,878,000,000.00    | Rp 17,370,224,455.18    | Rp 104,997,742,005.30   |
| Kota Kediri      | Rp 12,895,136,002.00    | Rp 48,350,618,003.91    | Rp 400,161,615,000.00    | Rp 23,891,000,000.00    | Rp 80,471,895,634.70    | Rp 124,158,953,280.00   |
| Kota Madiun      | Rp 8,597,497,646.00     | Rp 11,626,157,682.50    | Rp 266,187,291,000.00    | Rp 23,079,000,000.00    | Rp 56,221,696,132.38    | Rp 66,686,634,636.00    |
| Kota Malang      | Rp 42,727,420,351.23    | Rp 22,616,782,765.00    | Rp 473,050,489,000.00    | Rp 31,782,000,000.00    | Rp 64,822,253,488.30    | Rp 152,465,367,102.00   |
| Kota Mojokerto   | Rp 5,835,399,446.31     | Rp 14,505,431,850.15    | Rp 222,501,780,000.00    | Rp 26,781,000,000.00    | Rp 63,615,089,311.42    | Rp 61,518,469,855.00    |
| Kota Pasuruan    | Rp 5,473,559,321.00     | Rp 9,560,170,084.00     | Rp 225,590,456,000.00    | Rp 35,931,000,000.00    | Rp 76,705,453,323.21    | Rp 67,243,554,401.36    |
| Kota Probolinggo | Rp 6,319,226,594.00     | Rp 24,643,462,468.38    | Rp 250,880,269,000.00    | Rp 31,178,000,000.00    | Rp 29,570,013,182.06    | Rp 102,542,843,210.00   |
| Kota Surabaya    | Rp 397,990,195,606.00   | Rp 169,558,366,457.46   | Rp 713,590,304,000.00    | Rp 8,075,000,000.00     | Rp 1,290,518,378,166.00 | Rp 474,563,714,295.00   |
|                  |                         |                         | Total                    |                         |                         |                         |
|                  | Rp 1,035,612,372,041.10 | Rp 1,106,260,614,420.79 | Rp 19,513,024,062,400.00 | Rp 1,676,927,300,000.00 | Rp 5,058,038,553,755.13 | Rp 6,445,978,882,009.77 |

|                  | Pajak Daerah            | Retribusi Daerah        | DAU                      | DAK                     | SILPA                   | Belanja Modal           |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kab.Bangkalan    | Rp 8,321,972,033.00     | Rp 18,837,751,499.61    | Rp 478,768,360,000.00    | Rp 68,906,000,000.00    | Rp 32,556,724,185.26    | Rp 156,259,449,087.00   |
| Kab.Banyuwangi   | Rp 21,484,858,333.01    | Rp 30,774,665,887.48    | Rp 766,830,353,000.00    | Rp 79,909,000,000.00    | Rp 267,295,805,630.21   | Rp 299,667,852,129.67   |
| Kab.Blitir       | Rp 11,891,659,770.00    | Rp 12,565,457,889.00    | Rp 629,881,991,000.00    | Rp 74,839,000,000.00    | Rp 46,669,838,021.97    | Rp 189,543,568,987.37   |
| Kab.Bojonegoro   | Rp 13,450,828,387.00    | Rp 15,081,489,498.50    | Rp 596,430,263,000.00    | Rp 42,913,000,000.00    | Rp 71,828,615,553.43    | Rp 215,207,621,221.60   |
| Kab.Bondowoso    | Rp 5,258,596,820.00     | Rp 24,621,752,403.40    | Rp 455,430,603,000.00    | Rp 44,047,000,000.00    | Rp 68,628,667,539.42    | Rp 112,005,479,411.00   |
| Kab.Gresik       | Rp 63,417,194,147.66    | Rp 19,041,401,808.19    | Rp 511,324,320,000.00    | Rp 62,374,000,000.00    | Rp 73,632,402,155.30    | Rp 123,202,543,044.00   |
| Kab.Jember       | Rp 26,471,856,842.00    | Rp 79,007,402,211.00    | Rp 940,397,110,000.00    | Rp 74,621,000,000.00    | Rp 92,331,921,994.15    | Rp 226,759,413,838.00   |
| Kab.Jombang      | Rp 17,784,228,519.80    | Rp 61,399,604,457.52    | Rp 601,450,366,000.00    | Rp 49,308,000,000.00    | Rp 128,709,144,782.17   | Rp 140,543,219,305.24   |
| Kab.Kediri       | Rp 19,903,527,136.50    | Rp 32,541,936,818.71    | Rp 701,502,292,000.00    | Rp 13,752,000,000.00    | Rp 192,722,730,705.94   | Rp 253,319,776,445.00   |
| Kab.Lamongan     | Rp 16,537,881,443.00    | Rp 25,096,757,445.00    | Rp 581,718,829,000.00    | Rp 83,560,000,000.00    | Rp 46,779,487,247.02    | Rp 206,287,004,700.00   |
| Kab.Lumajang     | Rp 13,481,736,899.00    | Rp 39,990,829,035.00    | Rp 534,208,130,000.00    | Rp 70,897,000,000.00    | Rp 81,482,278,883.75    | Rp 85,380,769,905.00    |
| Kab.Madiun       | Rp 7,910,754,612.20     | Rp 16,112,174,661.57    | Rp 463,533,738,000.00    | Rp 48,554,000,000.00    | Rp 40,790,769,560.78    | Rp 138,596,784,156.00   |
| Kab.Magetan      | Rp 8,034,046,638.80     | Rp 27,565,482,053.56    | Rp 489,555,386,000.00    | Rp 69,980,000,000.00    | Rp 88,784,751,737.15    | Rp 139,055,082,824.00   |
| Kab.Malang       | Rp 33,782,874,886.00    | Rp 24,512,496,389.00    | Rp 959,098,690,000.00    | Rp 93,983,000,000.00    | Rp 101,965,692,961.35   | Rp 282,790,499,270.00   |
| Kab.Mojokerto    | Rp 28,996,000,338.55    | Rp 20,704,236,197.15    | Rp 502,176,671,000.00    | Rp 64,675,000,000.00    | Rp 134,666,860,075.34   | Rp 139,741,392,302.00   |
| Kab.Ngajuk       | Rp 10,062,661,242.34    | Rp 51,873,544,356.25    | Rp 590,834,933,000.00    | Rp 71,311,000,000.00    | Rp 92,923,674,010.60    | Rp 207,157,097,345.00   |
| Kab.Ngawi        | Rp 8,794,830,081.00     | Rp 10,000,480,061.00    | Rp 555,625,375,000.00    | Rp 69,847,000,000.00    | Rp 7,948,417,368.86     | Rp 101,671,442,161.16   |
| Kab.Pacitan      | Rp 4,876,459,117.00     | Rp 16,731,537,493.38    | Rp 429,136,640,000.00    | Rp 61,207,000,000.00    | Rp 40,589,509,931.24    | Rp 97,189,650,565.65    |
| Kab.Pamekasan    | Rp 6,892,279,331.00     | Rp 22,868,513,902.07    | Rp 458,239,639,000.00    | Rp 60,478,000,000.00    | Rp 98,995,106,678.55    | Rp 139,685,851,894.00   |
| Kab.Pasuruan     | Rp 48,210,593,747.72    | Rp 24,349,117,759.30    | Rp 606,162,820,000.00    | Rp 88,929,172,000.00    | Rp 172,739,544,162.19   | Rp 190,172,286,609.00   |
| Kab.Ponorogo     | Rp 10,702,044,984.50    | Rp 29,280,114,944.46    | Rp 550,746,051,000.00    | Rp 78,219,000,000.00    | Rp 54,438,829,137.45    | Rp 150,960,894,157.60   |
| Kab.Probolinggo  | Rp 9,494,801,630.00     | Rp 20,670,476,245.00    | Rp 551,285,137,000.00    | Rp 44,996,000,000.00    | Rp 70,602,044,708.73    | Rp 164,940,475,505.00   |
| Kab.Sampang      | Rp 3,637,540,618.00     | Rp 17,116,750,710.50    | Rp 442,747,075,000.00    | Rp 75,610,000,000.00    | Rp 201,902,987,691.33   | Rp 257,821,922,964.00   |
| Kab.Sidoarjo     | Rp 123,268,123,919.77   | Rp 43,491,131,245.00    | Rp 666,155,936,000.00    | Rp 45,382,000,000.00    | Rp 136,407,478,545.53   | Rp 250,711,437,331.00   |
| Kab.Situbondo    | Rp 8,036,364,768.00     | Rp 12,673,280,619.75    | Rp 433,443,480,000.00    | Rp 60,792,000,000.00    | Rp 136,572,036,847.90   | Rp 122,877,793,721.00   |
| Kab.Sumenep      | Rp 5,995,493,501.00     | Rp 17,930,575,903.00    | Rp 565,831,196,000.00    | Rp 34,140,000,000.00    | Rp 221,754,225,209.08   | Rp 148,315,173,556.75   |
| Kab.Trenggalek   | Rp 6,965,416,166.00     | Rp 11,044,332,160.00    | Rp 465,947,589,000.00    | Rp 68,943,000,000.00    | Rp 95,430,935,842.24    | Rp 114,411,456,448.00   |
| Kab.Tuban        | Rp 43,625,085,459.00    | Rp 28,976,875,644.00    | Rp 520,019,541,000.00    | Rp 59,524,000,000.00    | Rp 199,716,922,990.60   | Rp 257,722,625,916.00   |
| Kab.Tubungagung  | Rp 12,995,028,234.20    | Rp 59,139,506,202.75    | Rp 625,040,351,000.00    | Rp 83,750,000,000.00    | Rp 40,919,214,067.32    | Rp 130,392,638,058.49   |
| Kota Batu        | Rp 7,861,348,123.00     | Rp 3,087,977,630.00     | Rp 218,135,356,000.00    | Rp 33,037,000,000.00    | Rp 55,348,519,138.69    | Rp 143,102,657,348.00   |
| Kota Blitar      | Rp 4,038,997,939.00     | Rp 24,234,935,748.47    | Rp 225,699,721,000.00    | Rp 33,100,000,000.00    | Rp 10,034,280,398.92    | Rp 111,495,557,389.96   |
| Kota Kediri      | Rp 14,237,388,734.00    | Rp 10,494,169,558.34    | Rp 408,246,662,000.00    | Rp 28,260,000,000.00    | Rp 129,096,948,298.97   | Rp 197,282,177,074.00   |
| Kota Madiun      | Rp 9,427,601,807.00     | Rp 13,653,458,797.00    | Rp 272,305,980,000.00    | Rp 30,825,000,000.00    | Rp 58,426,337,748.93    | Rp 74,336,559,801.02    |
| Kota Malang      | Rp 49,467,066,282.96    | Rp 23,533,733,096.00    | Rp 471,739,208,000.00    | Rp 20,597,000,000.00    | Rp 59,420,938,781.04    | Rp 226,717,544,173.00   |
| Kota Mojokerto   | Rp 6,419,093,230.30     | Rp 16,016,381,509.00    | Rp 238,044,910,000.00    | Rp 26,788,000,000.00    | Rp 77,794,939,055.21    | Rp 120,059,713,810.50   |
| Kota Pasuruan    | Rp 6,274,337,402.00     | Rp 13,507,360,165.00    | Rp 230,764,737,000.00    | Rp 38,546,000,000.00    | Rp 144,044,127,637.08   | Rp 114,358,995,117.00   |
| Kota Probolinggo | Rp 6,848,148,684.80     | Rp 26,696,154,761.25    | Rp 259,533,136,000.00    | Rp 35,056,000,000.00    | Rp 28,790,192,417.00    | Rp 133,313,103,134.01   |
| Kota Surabaya    | Rp 442,852,257,428.00   | Rp 164,247,724,956.30   | Rp 765,885,571,000.00    | Rp 28,616,916,000.00    | Rp 1,579,082,113,082.00 | Rp 1,143,038,576,007.00 |
|                  | <b>Total</b>            |                         |                          |                         |                         |                         |
|                  | Rp 1,147,710,979,237.11 | Rp 1,108,471,571,722.51 | Rp 19,763,938,166,000.00 | Rp 2,120,272,088,000.00 | Rp 5,181,825,014,782.70 | Rp 7,306,296,086,713.02 |

Tabel 201

|                  | Pajak Daerah            | Retribusi Daerah      | DAU                      | DAK                     | SILPA                   | Belanja Modal           |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kab. Bangkalan   | Rp 8,558,677,480.00     | Rp 11,582,515,251.82  | Rp 497,993,900,000.00    | Rp 70,109,300,000.00    | Rp 36,090,675,821.88    | Rp 131,910,935,772.00   |
| Kab. Banyuwangi  | Rp 26,131,270,485.84    | Rp 20,810,313,878.94  | Rp 761,897,082,000.00    | Rp 81,595,300,000.00    | Rp 242,639,271,983.76   | Rp 137,257,934,500.96   |
| Kab. Blitar      | Rp 13,599,217,141.00    | Rp 13,200,186,345.00  | Rp 639,739,427,000.00    | Rp 63,901,500,000.00    | Rp 65,048,824,882.95    | Rp 174,225,246,096.50   |
| Kab. Bojonegoro  | Rp 14,978,188,747.00    | Rp 13,092,045,689.97  | Rp 583,763,532,000.00    | Rp 57,373,200,000.00    | Rp 90,389,709,239.67    | Rp 116,052,979,224.00   |
| Kab. Bondowoso   | Rp 6,156,076,823.00     | Rp 34,468,356,419.13  | Rp 479,819,794,000.00    | Rp 58,151,300,000.00    | Rp 41,932,944,220.68    | Rp 113,213,796,549.81   |
| Kab. Gresik      | Rp 72,386,828,278.46    | Rp 28,377,458,153.68  | Rp 513,481,870,000.00    | Rp 27,171,200,000.00    | Rp 30,747,204,876.86    | Rp 84,846,022,597.50    |
| Kab. Jember      | Rp 30,917,767,094.00    | Rp 19,602,718,100.00  | Rp 955,007,373,000.00    | Rp 87,752,900,000.00    | Rp 93,697,884,388.33    | Rp 149,822,296,804.15   |
| Kab. Jombang     | Rp 19,023,022,752.46    | Rp 18,311,819,028.00  | Rp 606,942,500,000.00    | Rp 50,279,900,000.00    | Rp 82,733,914,771.35    | Rp 78,758,201,150.70    |
| Kab. Kediri      | Rp 21,882,399,902.00    | Rp 31,913,628,629.79  | Rp 693,062,072,000.00    | Rp 61,016,200,000.00    | Rp 172,649,542,454.29   | Rp 147,903,177,747.86   |
| Kab. Lamongan    | Rp 17,540,953,399.00    | Rp 12,222,044,607.00  | Rp 606,700,000,000.00    | Rp 59,965,300,000.00    | Rp 21,144,510,191.51    | Rp 106,435,063,468.00   |
| Kab. Lumajang    | Rp 16,731,655,724.00    | Rp 18,155,994,884.75  | Rp 557,172,733,000.00    | Rp 61,751,200,000.00    | Rp 80,978,881,839.14    | Rp 75,963,695,789.00    |
| Kab. Madiun      | Rp 8,005,370,142.85     | Rp 7,903,253,346.06   | Rp 476,031,395,000.00    | Rp 44,983,000,000.00    | Rp 33,630,002,277.35    | Rp 98,512,664,074.00    |
| Kab. Magetan     | Rp 7,690,168,696.00     | Rp 9,313,009,412.50   | Rp 503,707,903,000.00    | Rp 46,131,400,000.00    | Rp 83,726,585,657.13    | Rp 64,212,256,464.00    |
| Kab. Malang      | Rp 39,262,653,309.00    | Rp 29,861,750,127.01  | Rp 967,107,349,000.00    | Rp 88,658,700,000.00    | Rp 139,228,943,838.60   | Rp 270,603,895,728.60   |
| Kab. Mojokerto   | Rp 32,125,258,301.20    | Rp 30,942,561,938.90  | Rp 529,761,802,000.00    | Rp 38,706,000,000.00    | Rp 86,125,091,189.69    | Rp 73,324,164,713.00    |
| Kab. Nganjuk     | Rp 11,592,119,855.06    | Rp 8,740,102,803.77   | Rp 598,046,354,000.00    | Rp 58,462,400,000.00    | Rp 83,300,900,227.46    | Rp 75,499,653,605.80    |
| Kab. Ngawi       | Rp 9,582,526,496.00     | Rp 2,859,910,145.59   | Rp 572,965,157,000.00    | Rp 57,853,200,000.00    | Rp 24,890,281,635.53    | Rp 51,403,919,651.00    |
| Kab. Pacitan     | Rp 5,155,151,458.00     | Rp 7,923,822,016.17   | Rp 435,690,795,000.00    | Rp 57,983,600,000.00    | Rp 35,196,668,939.62    | Rp 72,094,433,778.27    |
| Kab. Pamekasan   | Rp 7,224,651,386.00     | Rp 32,051,520,343.07  | Rp 475,711,035,000.00    | Rp 53,507,900,000.00    | Rp 92,298,216,547.03    | Rp 101,443,788,544.00   |
| Kab. Pasuruan    | Rp 55,937,020,214.40    | Rp 26,851,785,301.68  | Rp 636,119,395,000.00    | Rp 61,458,700,000.00    | Rp 181,708,963,818.86   | Rp 128,619,417,002.00   |
| Kab. Ponorogo    | Rp 11,124,661,304.00    | Rp 32,401,943,374.66  | Rp 563,867,637,000.00    | Rp 59,699,600,000.00    | Rp 40,501,051,513.52    | Rp 98,140,663,137.00    |
| Kab. Probolinggo | Rp 11,375,722,891.00    | Rp 22,074,109,694.00  | Rp 568,850,488,000.00    | Rp 48,620,800,000.00    | Rp 59,725,631,793.62    | Rp 100,021,193,246.95   |
| Kab. Sampang     | Rp 5,055,708,343.00     | Rp 18,244,618,791.46  | Rp 454,853,945,000.00    | Rp 62,379,400,000.00    | Rp 110,629,552,796.83   | Rp 211,812,573,330.15   |
| Kab. Sidoarjo    | Rp 143,915,458,137.16   | Rp 62,550,632,684.97  | Rp 666,336,274,000.00    | Rp 56,341,900,000.00    | Rp 139,514,534,164.70   | Rp 174,710,771,486.00   |
| Kab. Situbondo   | Rp 9,246,964,308.00     | Rp 8,221,138,726.75   | Rp 447,609,618,000.00    | Rp 39,967,200,000.00    | Rp 111,960,395,540.87   | Rp 85,925,600,152.87    |
| Kab. Sumenep     | Rp 7,136,069,604.00     | Rp 22,335,822,100.00  | Rp 580,851,656,000.00    | Rp 47,900,500,000.00    | Rp 155,543,970,561.11   | Rp 93,227,959,695.00    |
| Kab. Trenggalek  | Rp 6,926,392,797.91     | Rp 18,320,266,203.50  | Rp 472,359,819,000.00    | Rp 60,708,000,000.00    | Rp 76,133,544,178.69    | Rp 89,494,803,780.00    |
| Kab. Tuban       | Rp 44,627,024,519.00    | Rp 27,718,506,607.80  | Rp 541,454,144,000.00    | Rp 37,105,600,000.00    | Rp 173,342,809,413.00   | Rp 245,237,183,183.00   |
| Kab. Tulungagung | Rp 16,449,108,667.40    | Rp 13,002,271,090.50  | Rp 648,991,116,000.00    | Rp 52,432,900,000.00    | Rp 76,171,659,206.57    | Rp 126,601,969,163.00   |
| Kota Batu        | Rp 9,529,225,958.00     | Rp 3,478,065,774.00   | Rp 247,723,360,200.00    | Rp 18,275,000,000.00    | Rp 26,423,274,554.63    | Rp 97,543,062,910.03    |
| Kota Blitar      | Rp 4,858,472,679.00     | Rp 6,649,853,795.38   | Rp 223,964,245,000.00    | Rp 14,303,500,000.00    | Rp 15,529,456,149.49    | Rp 91,736,072,130.74    |
| Kota Kediri      | Rp 16,923,398,116.00    | Rp 10,084,030,919.94  | Rp 421,789,650,000.00    | Rp 903,700,000.00       | Rp 86,930,488,092.10    | Rp 158,431,307,643.00   |
| Kota Madiun      | Rp 12,744,350,430.00    | Rp 19,233,818,234.00  | Rp 271,396,486,000.00    | Rp 17,502,800,000.00    | Rp 85,456,187,083.88    | Rp 123,209,747,855.00   |
| Kota Malang      | Rp 60,151,082,871.20    | Rp 27,342,779,004.00  | Rp 494,910,987,000.00    | Rp 7,476,800,000.00     | Rp 69,429,062,441.70    | Rp 195,134,340,828.96   |
| Kota Mojokerto   | Rp 7,270,048,616.27     | Rp 19,615,315,177.00  | Rp 244,969,563,000.00    | Rp 15,042,400,000.00    | Rp 34,161,059,717.66    | Rp 88,017,059,240.00    |
| Kota Pasuruan    | Rp 6,840,982,078.00     | Rp 15,680,924,086.00  | Rp 231,964,161,000.00    | Rp 1,579,950,000.00     | Rp 181,708,963,818.86   | Rp 72,568,325,887.00    |
| Kota Probolinggo | Rp 7,701,059,684.00     | Rp 29,649,626,604.11  | Rp 268,392,765,000.00    | Rp 21,104,800,000.00    | Rp 44,871,365,657.46    | Rp 105,488,555,563.27   |
| Kota Surabaya    | Rp 525,403,484,538.00   | Rp 183,312,246,927.48 | Rp 652,532,472,000.00    | Rp 59,885,800,000.00    | Rp 1,112,291,194,271.90 | Rp 1,034,993,417,352.81 |
|                  |                         | <b>Total</b>          |                          |                         |                         |                         |
|                  | Rp 1,331,760,193,227.21 | Rp 918,100,766,218.38 | Rp 20,093,139,854,200.00 | Rp 1,808,042,850,000.00 | Rp 4,318,483,219,758.28 | Rp 5,444,398,149,845.93 |

|                  | Pajak Daerah            | Retribusi Daerah        | DAU                      | DAK                     | SilPA                   | Belanja Modal           |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kab.Bangkalan    | Rp 12,607,491,954.00    | Rp 17,840,109,824.50    | Rp 565,621,082,000.00    | Rp 88,386,100,000.00    | Rp 145,615,803,109.53   | Rp 289,713,354,612.00   |
| Kab.Banyuwangi   | Rp 32,449,080,866.10    | Rp 21,621,743,609.84    | Rp 815,156,279,000.00    | Rp 81,911,900,000.00    | Rp 220,757,297.57       | Rp 250,847,215,238.00   |
| Kab.Blitar       | Rp 17,455,401,496.00    | Rp 13,416,915,968.00    | Rp 697,649,769,000.00    | Rp 89,971,900,000.00    | Rp 59,807,263,391.97    | Rp 160,389,019,278.64   |
| Kab.Bojonegoro   | Rp 53,172,172,455.75    | Rp 31,383,990,205.98    | Rp 665,218,290,000.00    | Rp 67,916,900,000.00    | Rp 171,880,859,194.12   | Rp 118,561,540,199.00   |
| Kab.Bondowoso    | Rp 9,092,480,799.00     | Rp 15,553,447,295.00    | Rp 539,918,142,000.00    | Rp 66,936,000,000.00    | Rp 94,895,449,951.08    | Rp 169,878,279,817.00   |
| Kab.Gresik       | Rp 135,091,751,487.11   | Rp 37,969,820,988.92    | Rp 561,081,899,000.00    | Rp 46,338,700,000.00    | Rp 42,667,901,317.35    | Rp 127,092,938,727.00   |
| Kab.Jember       | Rp 40,708,973,394.50    | Rp 20,816,368,771.00    | Rp 1,058,648,472,000.00  | Rp 99,597,200,000.00    | Rp 132,693,582,660.89   | Rp 210,061,688,084.75   |
| Kab.Jombang      | Rp 24,705,170,574.39    | Rp 21,945,014,078.00    | Rp 664,465,787,000.00    | Rp 43,069,400,000.00    | Rp 94,627,032,234.39    | Rp 68,703,991,010.68    |
| Kab.Kediri       | Rp 32,784,017,440.93    | Rp 14,273,202,910.05    | Rp 750,225,450,000.00    | Rp 47,492,900,000.00    | Rp 202,065,286,330.46   | Rp 226,071,951,149.00   |
| Kab.Lamongan     | Rp 21,555,913,874.82    | Rp 12,621,817,231.00    | Rp 679,813,150,000.00    | Rp 88,252,200,000.00    | Rp 38,843,861,701.85    | Rp 190,276,002,925.00   |
| Kab.Lumajang     | Rp 15,625,963,240.00    | Rp 19,705,159,253.00    | Rp 605,781,974,000.00    | Rp 48,912,900,000.00    | Rp 105,181,346,089.35   | Rp 112,377,575,574.00   |
| Kab.Madiun       | Rp 12,101,942,571.65    | Rp 10,638,791,352.98    | Rp 523,027,021,000.00    | Rp 53,121,900,000.00    | Rp 90,825,653,690.57    | Rp 120,721,114,847.01   |
| Kab.Magetan      | Rp 9,890,524,870.00     | Rp 10,676,494,201.00    | Rp 546,307,211,000.00    | Rp 56,660,800,000.00    | Rp 99,697,678,370.75    | Rp 147,506,172,726.00   |
| Kab.Malang       | Rp 64,689,653,942.25    | Rp 37,145,935,538.45    | Rp 1,048,943,562,000.00  | Rp 108,468,200,000.00   | Rp 155,918,076,224.67   | Rp 291,757,474,147.00   |
| Kab.Mojokerto    | Rp 58,395,460,728.25    | Rp 37,452,623,578.63    | Rp 598,664,725,000.00    | Rp 57,903,900,000.00    | Rp 113,990,109,877.16   | Rp 157,374,186,370.00   |
| Kab.Nganjuk      | Rp 15,125,249,895.14    | Rp 12,290,949,560.08    | Rp 669,591,985,000.00    | Rp 46,303,650,000.00    | Rp 115,645,235,314.25   | Rp 113,963,922,938.00   |
| Kab.Ngawi        | Rp 11,499,047,139.00    | Rp 9,653,987,452.00     | Rp 654,412,778,000.00    | Rp 69,759,800,000.00    | Rp 27,454,818,481.68    | Rp 155,727,904,782.00   |
| Kab.Pacitan      | Rp 6,006,625,272.00     | Rp 11,626,055,797.77    | Rp 480,580,537,000.00    | Rp 54,055,900,000.00    | Rp 49,040,415,121.77    | Rp 144,255,052,183.02   |
| Kab.Pamekasan    | Rp 9,563,301,396.10     | Rp 9,282,566,261.24     | Rp 513,246,316,000.00    | Rp 63,850,100,000.00    | Rp 120,246,070,689.62   | Rp 161,158,657,395.69   |
| Kab.Pasuruan     | Rp 91,429,897,149.24    | Rp 47,559,013,028.10    | Rp 714,197,150,000.00    | Rp 75,424,200,000.00    | Rp 139,459,771,680.12   | Rp 146,451,940,246.53   |
| Kab.Ponorogo     | Rp 16,116,664,405.71    | Rp 41,815,744,504.83    | Rp 694,409,502,000.00    | Rp 74,774,900,000.00    | Rp 45,355,931,197.26    | Rp 127,715,395,078.00   |
| Kab.Probolinggo  | Rp 14,500,649,959.00    | Rp 37,363,470,509.99    | Rp 638,828,595,000.00    | Rp 75,520,400,000.00    | Rp 101,022,503,112.84   | Rp 225,588,664,789.00   |
| Kab.Sampang      | Rp 6,628,833,412.97     | Rp 27,927,619,665.91    | Rp 499,433,081,000.00    | Rp 68,533,700,000.00    | Rp 97,865,421,068.00    | Rp 184,835,086,870.00   |
| Kab.Sidoarjo     | Rp 264,538,593,736.65   | Rp 72,700,186,148.00    | Rp 758,701,153,000.00    | Rp 59,774,500,000.00    | Rp 213,064,814,487.83   | Rp 209,377,144,698.00   |
| Kab.Situbondo    | Rp 11,111,182,280.03    | Rp 9,211,617,798.00     | Rp 515,752,127,000.00    | Rp 60,942,300,000.00    | Rp 112,557,531,392.58   | Rp 120,719,312,264.00   |
| Kab.Sumenep      | Rp 7,365,871,595.00     | Rp 26,987,770,440.55    | Rp 664,406,763,000.00    | Rp 67,746,000,000.00    | Rp 171,172,585,739.91   | Rp 132,179,249,804.47   |
| Kab.Trenggalek   | Rp 8,860,195,981.91     | Rp 18,999,957,490.50    | Rp 535,245,063,000.00    | Rp 61,768,100,000.00    | Rp 78,921,688,253.26    | Rp 126,243,346,382.00   |
| Kab.Tuban        | Rp 59,317,208,378.25    | Rp 38,063,038,008.33    | Rp 605,942,744,000.00    | Rp 66,425,800,000.00    | Rp 146,035,249,666.53   | Rp 210,334,179,653.30   |
| Kab.Tulungagung  | Rp 22,086,869,272.74    | Rp 13,843,257,383.13    | Rp 723,703,537,000.00    | Rp 80,751,100,000.00    | Rp 84,707,645,697.70    | Rp 137,953,157,645.33   |
| Kota Batu        | Rp 19,404,220,619.00    | Rp 4,048,972,418.00     | Rp 273,492,290,000.00    | Rp 17,583,600,000.00    | Rp 31,632,370,048.05    | Rp 106,341,048,268.00   |
| Kota Blitar      | Rp 10,533,996,120.50    | Rp 6,687,731,370.00     | Rp 250,086,735,000.00    | Rp 23,441,800,000.00    | Rp 28,522,614,899.97    | Rp 164,987,191,353.36   |
| Kota Kediri      | Rp 34,027,160,429.00    | Rp 9,134,826,942.84     | Rp 399,061,891,000.00    | Rp 4,525,800,000.00     | Rp 88,459,143,412.45    | Rp 105,611,921,273.70   |
| Kota Madiun      | Rp 23,200,982,101.00    | Rp 26,456,644,263.00    | Rp 297,695,488,000.00    | Rp 24,070,500,000.00    | Rp 89,445,496,882.41    | Rp 95,674,953,766.00    |
| Kota Malang      | Rp 125,332,979,877.83   | Rp 31,217,425,090.00    | Rp 533,491,887,000.00    | Rp 25,578,900,000.00    | Rp 67,571,686,021.77    | Rp 160,159,269,793.00   |
| Kota Mojokerto   | Rp 12,633,038,537.65    | Rp 3,279,025,482.50     | Rp 265,452,147,000.00    | Rp 20,391,200,000.00    | Rp 17,532,560,159.36    | Rp 50,302,095,109.00    |
| Kota Pasuruan    | Rp 11,121,514,599.00    | Rp 14,677,534,832.00    | Rp 263,950,449,000.00    | Rp 15,244,300,000.00    | Rp 48,258,370,500.40    | Rp 79,827,843,341.00    |
| Kota Probolinggo | Rp 11,713,781,599.00    | Rp 10,584,456,372.00    | Rp 311,327,135,000.00    | Rp 22,574,500,000.00    | Rp 61,415,821,509.45    | Rp 107,039,867,358.90   |
| Kota Surabaya    | Rp 1,488,358,147,753.27 | Rp 209,834,317,887.85   | Rp 679,262,759,000.00    | Rp 49,874,625,000.00    | Rp 505,770,166,765.28   | Rp 543,111,645,989.00   |
|                  | Total                   |                         |                          |                         |                         |                         |
|                  | Rp 2,820,802,011,464.74 | Rp 1,016,307,603,508.97 | Rp 22,202,794,925,000.00 | Rp 2,173,856,575,000.00 | Rp 4,210,623,443,544.22 | Rp 6,251,091,355,686.38 |

## Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics

|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--|---|---------|---------|------|----------------|
|--|---|---------|---------|------|----------------|

|                    |     |                    |                      |                    |                    |
|--------------------|-----|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Pajak Daerah       | 190 | 2.643.875.425,00   | 1.488.358.147.753,27 | 38.095.401.813,69  | 124.811.452.498,12 |
| Retribusi Daerah   | 190 | 2.274.211.802,75   | 209.834.317.887,85   | 26.923.119.112,87  | 29.381.672.599,85  |
| DAU                | 190 | 188.025.000.000,00 | 1.058.648.472.000,00 | 522.415.807.807,35 | 176.272.044.927,03 |
| DAK                | 190 | 903.700.000,00     | 108.468.200.000,00   | 47.995.491.121,05  | 23.175.578.082,68  |
| SiLPA              | 190 | 7.948.417.368,86   | 1.579.082.113.082,00 | 119.913.952.150,23 | 175.798.030.743,93 |
| Belanja Modal      | 190 | 44.601.848.936,00  | 1.143.038.576.007,00 | 162.910.024.550,46 | 119.321.886.848,82 |
| Valid N (listwise) | 190 |                    |                      |                    |                    |

### **LAMPIRAN 3**

#### **HASIL ANALISIS REGRESI DAN ASUMSI KLASIK**

##### **Regression**

ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | Df  | Mean Square | F       | Sig.              |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1     | Regression | 1.986E24       | 5   | 3.973E23    | 103.732 | .000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 7.047E23       | 184 | 3.830E21    |         |                   |
|       | Total      | 2.691E24       | 189 |             |         |                   |

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak\_Daerah, DAU, Retribusi\_Daerah

b. Dependent Variable: Belanja\_Modal

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .859 <sup>a</sup> | .738     | .731              | 61884016268.51988          | 1.927         |

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak Daerah, DAU, Retribusi Daerah

b. Dependent variable: Belanja Modal

ANOVA<sup>b</sup>

| Model |            | Sum of Squares | Df  | Mean Square | F       | Sig.              |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1     | Regression | 1.986E24       | 5   | 3.973E23    | 103.732 | .000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 7.047E23       | 184 | 3.830E21    |         |                   |
|       | Total      | 2.691E24       | 189 |             |         |                   |

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak\_Daerah, DAU, Retribusi\_Daerah

b. Dependent Variable: Belanja\_Modal

Coefficients<sup>a</sup>

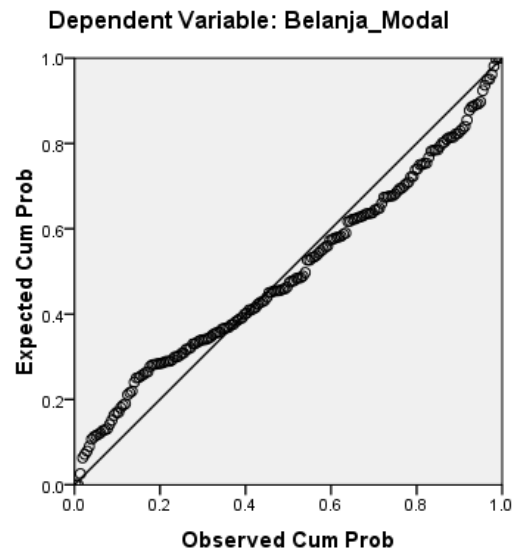
| Model        | Unstandardized Coefficients |                 | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|              | B                           | Std. Error      | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) | 25871139430.532             | 14350456793.946 |                           | 1.803 | .073 |                         |       |
| Pajak_Daerah | .127                        | .060            | .132                      | 2.109 | .036 | .361                    | 2.771 |

|                  |      |      |      |        |      |      |       |
|------------------|------|------|------|--------|------|------|-------|
| Retribusi_Daerah | .114 | .338 | .028 | .338   | .736 | .206 | 4.863 |
| DAU              | .092 | .036 | .137 | 2.585  | .011 | .510 | 1.963 |
| DAK              | .508 | .255 | .099 | 1.990  | .048 | .578 | 1.729 |
| SiLPA            | .471 | .041 | .693 | 11.442 | .000 | .388 | 2.580 |

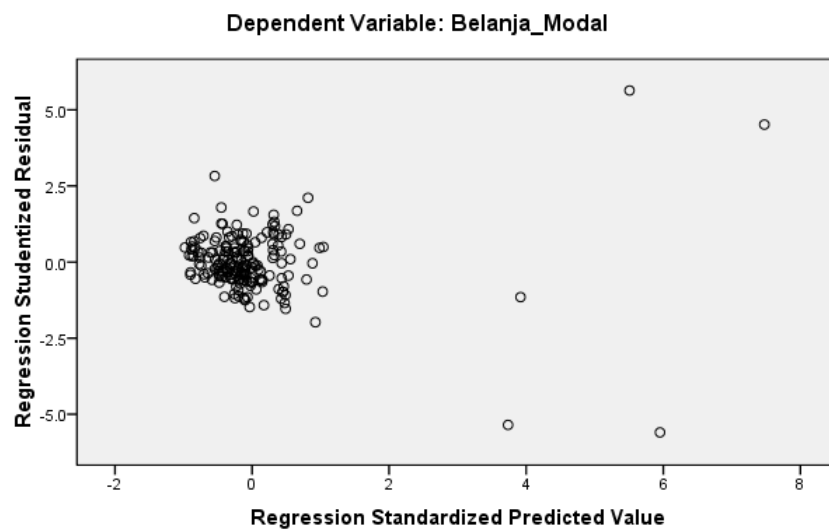
a. Dependent Variable: Belanja\_Modal

## Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



#### LAMPIRAN 4

## Tabel Durbin-Watson

**Tabel Durbin-Watson Statistic : 5 percent significant points of dL and dU**

|    | K=1   |       | K=2   |       | K=3   |       | K=4   |       | K=5   |       | K=6   |       | K=7   |       | K=8   |       | K=9   |       | K=10  |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| N  | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    |
| 6  | 0.610 | 1.400 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7  | 0.700 | 1.356 | 0.467 | 1.896 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8  | 0.763 | 1.332 | 0.559 | 1.777 | 0.368 | 2.287 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9  | 0.824 | 1.320 | 0.629 | 1.699 | 0.435 | 2.128 | 0.296 | 0.376 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 | 0.879 | 1.320 | 0.697 | 1.641 | 0.525 | 2.016 | 0.376 | 0.376 | 0.243 | 2.822 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11 | 0.927 | 1.324 | 0.758 | 1.604 | 0.595 | 1.928 | 0.444 | 0.283 | 0.316 | 2.645 | 0.203 | 0.203 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 | 0.971 | 1.331 | 0.812 | 1.579 | 0.658 | 1.864 | 0.512 | 0.177 | 0.379 | 2.506 | 0.268 | 2.832 | 0.171 | 3.149 |       |       |       |       |       |       |
| 13 | 1.010 | 1.340 | 0.861 | 1.562 | 0.715 | 1.816 | 0.574 | 2.094 | 0.445 | 2.390 | 0.328 | 2.692 | 0.230 | 2.985 | 0.147 | 3.266 |       |       |       |       |
| 14 | 1.045 | 1.350 | 0.905 | 1.551 | 0.767 | 1.779 | 0.632 | 2.030 | 0.505 | 2.296 | 0.389 | 2.572 | 0.286 | 2.848 | 0.200 | 3.111 | 0.127 | 3.360 |       |       |
| 15 | 1.077 | 1.361 | 0.946 | 1.543 | 0.814 | 1.750 | 0.685 | 1.977 | 0.562 | 2.220 | 0.447 | 2.472 | 0.343 | 2.727 | 0.231 | 2.979 | 0.175 | 3.216 | 0.111 | 3.438 |
| 16 | 1.106 | 1.371 | 0.982 | 1.539 | 0.857 | 1.728 | 0.734 | 1.935 | 0.615 | 2.157 | 0.502 | 2.388 | 0.398 | 2.624 | 0.304 | 2.860 | 0.222 | 3.090 | 0.155 | 3.504 |
| 17 | 1.133 | 1.381 | 1.015 | 1.536 | 0.897 | 1.710 | 0.779 | 1.900 | 0.664 | 2.104 | 0.554 | 2.318 | 0.451 | 2.537 | 0.356 | 2.757 | 0.272 | 2.975 | 0.198 | 3.184 |
| 18 | 1.158 | 1.391 | 1.046 | 1.535 | 0.933 | 1.696 | 0.820 | 1.872 | 0.710 | 2.060 | 0.603 | 2.257 | 0.502 | 2.461 | 0.407 | 2.667 | 0.321 | 2.873 | 0.244 | 3.073 |
| 19 | 1.180 | 1.401 | 1.074 | 1.536 | 0.967 | 1.685 | 0.859 | 1.848 | 0.752 | 2.023 | 0.649 | 2.206 | 0.559 | 2.396 | 0.456 | 2.589 | 0.369 | 2.783 | 0.290 | 2.974 |
| 20 | 1.120 | 1.411 | 1.100 | 1.537 | 0.998 | 1.676 | 0.894 | 1.828 | 0.792 | 1.991 | 0.692 | 2.162 | 0.595 | 2.339 | 0.502 | 2.521 | 0.416 | 2.704 | 0.336 | 2.885 |
| 21 | 1.221 | 1.420 | 1.125 | 1.538 | 1.026 | 1.669 | 0.927 | 1.812 | 0.829 | 1.964 | 0.732 | 2.124 | 0.637 | 2.290 | 0.547 | 2.460 | 0.461 | 2.633 | 0.380 | 2.806 |
| 22 | 1.239 | 1.429 | 1.147 | 1.541 | 1.053 | 1.664 | 0.958 | 1.797 | 0.863 | 1.940 | 0.769 | 2.090 | 0.677 | 2.246 | 0.588 | 2.407 | 0.504 | 2.571 | 0.424 | 2.734 |
| 23 | 1.257 | 1.437 | 1.168 | 1.543 | 1.078 | 1.660 | 0.986 | 1.785 | 0.895 | 1.920 | 0.804 | 2.061 | 0.715 | 2.208 | 0.628 | 2.360 | 0.545 | 2.514 | 0.465 | 2.670 |
| 24 | 1.273 | 1.446 | 1.188 | 1.546 | 1.101 | 1.656 | 1.013 | 1.775 | 0.925 | 1.902 | 0.837 | 2.033 | 0.751 | 2.174 | 0.666 | 2.318 | 0.584 | 2.464 | 0.506 | 2.613 |
| 25 | 1.288 | 1.454 | 1.206 | 1.550 | 1.123 | 1.654 | 1.038 | 1.767 | 0.953 | 1.886 | 0.868 | 2.012 | 0.784 | 2.144 | 0.702 | 2.280 | 0.621 | 2.419 | 0.544 | 2.560 |
| 26 | 1.302 | 1.461 | 1.224 | 1.553 | 1.143 | 1.652 | 1.062 | 1.759 | 0.979 | 1.873 | 0.897 | 1.992 | 0.816 | 2.117 | 0.735 | 2.246 | 0.657 | 2.379 | 0.581 | 2.513 |
| 27 | 1.316 | 1.469 | 1.240 | 1.556 | 1.162 | 1.651 | 1.084 | 1.753 | 1.004 | 1.861 | 0.925 | 1.974 | 0.845 | 2.093 | 0.767 | 2.216 | 0.691 | 2.342 | 0.616 | 2.470 |
| 28 | 1.328 | 1.476 | 1.255 | 1.560 | 1.181 | 1.650 | 1.104 | 1.747 | 1.028 | 1.850 | 0.951 | 1.958 | 0.874 | 2.071 | 0.798 | 2.188 | 0.723 | 2.309 | 0.650 | 2.431 |
| 29 | 1.341 | 1.483 | 1.270 | 1.563 | 1.198 | 1.650 | 1.124 | 1.743 | 1.050 | 1.841 | 0.975 | 1.944 | 0.900 | 2.052 | 0.826 | 2.164 | 0.753 | 2.278 | 0.682 | 2.396 |
| 30 | 1.352 | 1.489 | 1.284 | 1.567 | 1.214 | 1.650 | 1.143 | 1.739 | 1.071 | 1.833 | 0.998 | 1.931 | 0.926 | 2.034 | 0.854 | 2.141 | 0.782 | 2.251 | 0.712 | 2.363 |
| 31 | 1.363 | 1.496 | 1.297 | 1.570 | 1.229 | 1.650 | 1.160 | 1.735 | 1.090 | 1.825 | 1.020 | 1.920 | 0.950 | 2.018 | 0.879 | 2.120 | 0.810 | 2.226 | 0.741 | 2.333 |
| 32 | 1.373 | 1.502 | 1.309 | 1.574 | 1.244 | 1.650 | 1.177 | 1.732 | 1.109 | 1.819 | 1.041 | 1.909 | 0.972 | 2.004 | 0.904 | 2.102 | 0.836 | 2.203 | 0.769 | 2.306 |
| 33 | 1.383 | 1.508 | 1.321 | 1.577 | 1.258 | 1.651 | 1.193 | 1.730 | 1.127 | 1.813 | 1.061 | 1.900 | 0.994 | 1.991 | 0.927 | 2.085 | 0.861 | 2.181 | 0.795 | 2.281 |
| 34 | 1.393 | 1.514 | 1.333 | 1.580 | 1.271 | 1.652 | 1.208 | 1.728 | 1.144 | 1.808 | 1.080 | 1.891 | 1.015 | 1.979 | 0.950 | 2.069 | 0.885 | 2.162 | 0.821 | 2.257 |
| 35 | 1.402 | 1.519 | 1.343 | 1.584 | 1.283 | 1.653 | 1.222 | 1.726 | 1.160 | 1.803 | 1.097 | 1.884 | 1.034 | 1.967 | 0.971 | 2.054 | 0.908 | 2.144 | 0.845 | 2.236 |
| 36 | 1.411 | 1.525 | 1.354 | 1.587 | 1.295 | 1.654 | 1.236 | 1.724 | 1.175 | 1.799 | 1.114 | 1.877 | 1.053 | 1.957 | 0.991 | 2.041 | 0.930 | 2.127 | 0.868 | 2.216 |
| 37 | 1.419 | 1.530 | 1.364 | 1.590 | 1.307 | 1.655 | 1.249 | 1.723 | 1.190 | 1.795 | 1.131 | 1.870 | 1.071 | 1.948 | 1.011 | 2.029 | 0.951 | 2.112 | 0.791 | 2.197 |
| 38 | 1.427 | 1.535 | 1.373 | 1.594 | 1.318 | 1.656 | 1.261 | 1.722 | 1.204 | 1.792 | 1.146 | 1.864 | 1.088 | 1.939 | 1.039 | 2.017 | 0.970 | 2.098 | 0.912 | 2.180 |
| 39 | 1.435 | 1.540 | 1.382 | 1.597 | 1.328 | 1.658 | 1.273 | 1.722 | 1.218 | 1.789 | 1.161 | 1.859 | 1.104 | 1.932 | 1.047 | 2.007 | 0.990 | 2.085 | 0.932 | 2.164 |
| 40 | 1.442 | 1.544 | 1.391 | 1.600 | 1.338 | 1.659 | 1.285 | 1.721 | 1.230 | 1.786 | 1.175 | 1.854 | 1.120 | 1.924 | 1.064 | 1.997 | 1.008 | 2.072 | 0.945 | 2.149 |
| 45 | 1.475 | 1.566 | 1.430 | 1.615 | 1.383 | 1.666 | 1.336 | 1.720 | 1.287 | 1.776 | 1.238 | 1.835 | 1.189 | 1.895 | 1.139 | 1.938 | 1.089 | 2.002 | 1.038 | 2.088 |
| 50 | 1.503 | 1.583 | 1.462 | 1.628 | 1.421 | 1.674 | 1.378 | 1.721 | 1.335 | 1.771 | 1.291 | 1.822 | 1.246 | 1.875 | 1.201 | 1.930 | 1.156 | 1.986 | 1.110 | 2.044 |

| N   | K=1   |       | K=2   |       | K=3   |       | K=4   |       | K=5   |       | K=6   |       | K=7   |       | K=8   |       | K=9   |       | K=10  |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    | dL    | dU    |
| 55  | 1,528 | 1,601 | 1,490 | 1,641 | 1,452 | 1,681 | 1,414 | 1,724 | 1,374 | 1,768 | 1,334 | 1,814 | 1,294 | 1,861 | 1,253 | 1,909 | 1,212 | 1,959 | 1,170 | 2,010 |
| 60  | 1,549 | 1,616 | 1,514 | 1,652 | 1,480 | 1,689 | 1,444 | 1,727 | 1,408 | 1,767 | 1,372 | 1,808 | 1,335 | 1,850 | 1,298 | 1,894 | 1,260 | 1,939 | 1,222 | 1,984 |
| 65  | 1,567 | 1,639 | 1,536 | 1,662 | 1,503 | 1,696 | 1,471 | 1,731 | 1,438 | 1,767 | 1,404 | 1,805 | 1,370 | 1,843 | 1,336 | 1,882 | 1,301 | 1,923 | 1,266 | 1,964 |
| 70  | 1,583 | 1,641 | 1,554 | 1,672 | 1,525 | 1,703 | 1,494 | 1,735 | 1,464 | 1,768 | 1,433 | 1,802 | 1,401 | 1,837 | 1,369 | 1,873 | 1,337 | 1,910 | 1,305 | 1,948 |
| 75  | 1,598 | 1,652 | 1,571 | 1,680 | 1,543 | 1,709 | 1,515 | 1,739 | 1,487 | 1,770 | 1,458 | 1,801 | 1,428 | 1,834 | 1,399 | 1,867 | 1,369 | 1,901 | 1,339 | 1,935 |
| 80  | 1,611 | 1,662 | 1,586 | 1,688 | 1,560 | 1,715 | 1,534 | 1,743 | 1,507 | 1,772 | 1,480 | 1,801 | 1,453 | 1,831 | 1,425 | 1,861 | 1,397 | 1,893 | 1,369 | 1,925 |
| 85  | 1,624 | 1,671 | 1,600 | 1,696 | 1,575 | 1,721 | 1,550 | 1,747 | 1,525 | 1,774 | 1,500 | 1,801 | 1,474 | 1,829 | 1,448 | 1,857 | 1,422 | 1,886 | 1,396 | 1,916 |
| 90  | 1,635 | 1,679 | 1,612 | 1,703 | 1,589 | 1,726 | 1,566 | 1,751 | 1,542 | 1,776 | 1,518 | 1,801 | 1,494 | 1,827 | 1,469 | 1,854 | 1,445 | 1,881 | 1,420 | 1,909 |
| 95  | 1,645 | 1,687 | 1,623 | 1,709 | 1,602 | 1,732 | 1,579 | 1,755 | 1,557 | 1,778 | 1,535 | 1,802 | 1,512 | 1,827 | 1,489 | 1,852 | 1,465 | 1,877 | 1,442 | 1,903 |
| 100 | 1,654 | 1,694 | 1,634 | 1,715 | 1,613 | 1,736 | 1,592 | 1,758 | 1,571 | 1,780 | 1,550 | 1,803 | 1,528 | 1,826 | 1,506 | 1,850 | 1,484 | 1,874 | 1,462 | 1,898 |
| 105 | 1,663 | 1,701 | 1,643 | 1,721 | 1,624 | 1,741 | 1,604 | 1,762 | 1,584 | 1,783 | 1,563 | 1,804 | 1,543 | 1,826 | 1,522 | 1,848 | 1,501 | 1,871 | 1,480 | 1,894 |
| 110 | 1,671 | 1,707 | 1,652 | 1,726 | 1,634 | 1,746 | 1,615 | 1,765 | 1,596 | 1,785 | 1,576 | 1,805 | 1,557 | 1,826 | 1,537 | 1,847 | 1,517 | 1,869 | 1,497 | 1,891 |
| 115 | 1,678 | 1,713 | 1,661 | 1,731 | 1,643 | 1,750 | 1,625 | 1,768 | 1,606 | 1,787 | 1,588 | 1,807 | 1,569 | 1,827 | 1,550 | 1,847 | 1,531 | 1,867 | 1,512 | 1,888 |
| 120 | 1,685 | 1,719 | 1,668 | 1,736 | 1,651 | 1,754 | 1,634 | 1,772 | 1,616 | 1,790 | 1,599 | 1,808 | 1,581 | 1,827 | 1,563 | 1,846 | 1,545 | 1,866 | 1,526 | 1,885 |
| 125 | 1,692 | 1,724 | 1,676 | 1,741 | 1,659 | 1,757 | 1,643 | 1,775 | 1,626 | 1,792 | 1,609 | 1,810 | 1,592 | 1,828 | 1,574 | 1,846 | 1,557 | 1,864 | 1,539 | 1,883 |
| 130 | 1,698 | 1,729 | 1,683 | 1,745 | 1,667 | 1,761 | 1,651 | 1,777 | 1,635 | 1,794 | 1,618 | 1,811 | 1,602 | 1,828 | 1,585 | 1,846 | 1,569 | 1,863 | 1,552 | 1,881 |
| 135 | 1,704 | 1,734 | 1,689 | 1,749 | 1,674 | 1,765 | 1,658 | 1,780 | 1,643 | 1,796 | 1,627 | 1,813 | 1,611 | 1,829 | 1,596 | 1,846 | 1,579 | 1,863 | 1,563 | 1,880 |
| 140 | 1,710 | 1,738 | 1,695 | 1,753 | 1,680 | 1,768 | 1,666 | 1,783 | 1,651 | 1,798 | 1,636 | 1,814 | 1,620 | 1,830 | 1,605 | 1,846 | 1,590 | 1,862 | 1,574 | 1,879 |
| 145 | 1,715 | 1,743 | 1,701 | 1,757 | 1,687 | 1,771 | 1,672 | 1,786 | 1,658 | 1,800 | 1,643 | 1,815 | 1,629 | 1,831 | 1,614 | 1,846 | 1,599 | 1,862 | 1,584 | 1,878 |
| 150 | 1,720 | 1,746 | 1,706 | 1,760 | 1,693 | 1,774 | 1,679 | 1,788 | 1,665 | 1,802 | 1,651 | 1,817 | 1,637 | 1,832 | 1,622 | 1,847 | 1,608 | 1,862 | 1,594 | 1,877 |
| 155 | 1,724 | 1,750 | 1,711 | 1,764 | 1,698 | 1,777 | 1,685 | 1,791 | 1,671 | 1,804 | 1,658 | 1,818 | 1,644 | 1,833 | 1,630 | 1,847 | 1,616 | 1,861 | 1,602 | 1,876 |
| 160 | 1,729 | 1,754 | 1,716 | 1,767 | 1,704 | 1,780 | 1,691 | 1,793 | 1,678 | 1,806 | 1,664 | 1,820 | 1,651 | 1,834 | 1,638 | 1,847 | 1,624 | 1,861 | 1,611 | 1,876 |
| 165 | 1,733 | 1,758 | 1,721 | 1,770 | 1,709 | 1,783 | 1,696 | 1,795 | 1,683 | 1,808 | 1,671 | 1,821 | 1,658 | 1,835 | 1,645 | 1,848 | 1,632 | 1,861 | 1,619 | 1,875 |
| 170 | 1,737 | 1,761 | 1,725 | 1,773 | 1,713 | 1,785 | 1,701 | 1,798 | 1,689 | 1,810 | 1,677 | 1,823 | 1,664 | 1,835 | 1,652 | 1,848 | 1,639 | 1,862 | 1,626 | 1,875 |
| 175 | 1,741 | 1,764 | 1,730 | 1,776 | 1,718 | 1,788 | 1,706 | 1,800 | 1,694 | 1,812 | 1,682 | 1,824 | 1,670 | 1,836 | 1,658 | 1,849 | 1,646 | 1,862 | 1,634 | 1,875 |
| 180 | 1,745 | 1,767 | 1,734 | 1,779 | 1,722 | 1,790 | 1,711 | 1,802 | 1,699 | 1,814 | 1,688 | 1,825 | 1,676 | 1,837 | 1,664 | 1,850 | 1,652 | 1,862 | 1,640 | 1,874 |
| 185 | 1,749 | 1,770 | 1,738 | 1,781 | 1,727 | 1,792 | 1,716 | 1,804 | 1,693 | 1,815 | 1,693 | 1,827 | 1,682 | 1,838 | 1,670 | 1,850 | 1,659 | 1,862 | 1,647 | 1,874 |
| 190 | 1,752 | 1,773 | 1,741 | 1,784 | 1,731 | 1,795 | 1,720 | 1,806 | 1,698 | 1,817 | 1,698 | 1,828 | 1,687 | 1,839 | 1,676 | 1,851 | 1,664 | 1,863 | 1,653 | 1,874 |
| 195 | 1,755 | 1,776 | 1,745 | 1,786 | 1,735 | 1,797 | 1,724 | 1,808 | 1,713 | 1,818 | 1,703 | 1,829 | 1,692 | 1,840 | 1,681 | 1,852 | 1,670 | 1,863 | 1,659 | 1,874 |
| 200 | 1,758 | 1,778 | 1,748 | 1,789 | 1,738 | 1,799 | 1,728 | 1,810 | 1,718 | 1,820 | 1,707 | 1,831 | 1,697 | 1,841 | 1,686 | 1,832 | 1,675 | 1,863 | 1,665 | 1,874 |

Direproduksi oleh : Iunaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>) dari <http://www.standford.edu>